



REVITALISASI PASAR TRADISIONAL

*Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional
Dalam Perspektif Manajemen Ekonomi Kelembagaan*

Dr.Hj. SITTI HASBIAH M.Si

**REVITALISASI PASAR TRADISIONAL:
Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional
dalam Perspektif Manajemen dan Ekonomi
Kelembagaan**

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si.

**EDITOR:
Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.
Asrul Muslim, S.Ag, M.Pd**

carabaca

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

Revitalisasi Pasar Tradisional: Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional dalam Perspektif Manajemen dan Ekonomi Kelembagaan
Copyright @ Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

Diterbitkan Pertama Kali dalam Bahasa Indonesia oleh penerbit pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) rumahbuku carabaca
Cetakan I, April 2014

Editor : Muhammad Hasan dan Asrul Muslim
Penata Letak : Ridho
Sampul : Alyo

Perpustakaan Nasional, Katalog dalam terbitan (KDT)
Revitalisasi Pasar Tradisional: Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional dalam Perspektif Manajemen dan Ekonomi Kelembagaan
viii + 144 halaman; 15 cm x 23 cm
ISBN : 978-602-1175-10-1

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini untuk kepentingan komersial. Boleh mengutip, memperbanyak dan menyebarkan untuk kepentingan jurnalistik, ilmiah dan advokasi. Semua tindakan pembajakan diatur oleh perundang-undangan.

Penerbit: carabaca
Jl. Mustafa Dg. Bunga,
Kompleks Griya Samata Permai
Telp. 081241404323
Lari_larija@yahoo.co.id

KATA

Atas berkat dan "Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif ini dapat diselesaikan. Bul penulis untuk turut serta m kehidupan bangsa, karena bermanfaat bagi orang bany:

Dalam dunia empiri (*middleman*) yang harus dil konsumen. Semakin banyal distribusi, maka semakin p Seluruh aktivitas yang berka dan jasa kepada konsumen a Sektor perdagangan seluruh barang yang diprod impor. Berfungsinya pedan barang akan mendapatkan makro menjadi sangat s perdagangan akan sangat p perkembangan ekonomi nas

Berkaitan dengan p warsa yang lalu, sebagian bahwa pusat pembelanja

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

Saing Pasar Tradisional
an

sia oleh penerbit pusat
u carabaca

Muslim

KDT)
ing Pasar Tradisional
an

*perbanyak seluruh atau
b mengutip, memperbanyak
dan advokasi. Semua*

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Buku "Revitalisasi Pasar Tradisional: Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional dalam Perspektif Manajemen dan Ekonomi Kelembagaan" ini dapat diselesaikan. Buku ini lahir, sebagai manifestasi keinginan penulis untuk turut serta memberikan andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena sebaik-baiknya ilmu, adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak.

Dalam dunia empirik dijumpai adanya sejumlah pedagang antara (*middleman*) yang harus dilalui sebelum barang itu sampai ke tangan konsumen. Semakin banyak pedagang antara yang ada dalam struktur distribusi, maka semakin panjang rantai distribusi yang harus dilalui. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penawaran dan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir akan dilakukan oleh pedagang eceran.

Sektor perdagangan eceran pada hakekatnya merupakan muara seluruh barang yang diproduksi di dalam negeri ditambah barang hasil impor. Berfungsinya pedagang eceran sebagai muara dari distribusi barang akan mendapatkan posisinya dalam struktur perekonomian makro menjadi sangat strategis, atau dengan kata lain, sektor perdagangan akan sangat peka terhadap gelombang pasang surutnya perkembangan ekonomi nasional.

Berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat pada satu dasawarsa yang lalu, sebagian masyarakat Indonesia hanya mengetahui bahwa pusat pembelanjaan yang ada itu adalah pasar tradisional,

yang lazimnya tempat ini menjual berbagai kebutuhan rumah tangga seperti bumbu masak, ikan, sayur-mayur dan sebagainya.

Penggunaan istilah pasar tradisional dalam penulisan ini dimaksudkan sebagai tempat bertemunya pedagang eceran dan pembeli untuk melakukan transaksi barang kebutuhan sehari-hari dengan organisasi pasar yang ada masih sangat sederhana, tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah, serta pola bangunan yang apa adanya (sempit) sebagaimana disediakan oleh pemerintah daerah setempat.

Apabila pola belanja masyarakat dikaitkan dengan indikasi pedapatan perkapita Indonesia yang masih dalam transisi menuju pada pendapatan mencapai angka US \$ 1.000,00 maka kemungkinan keberadaan pasar tradisional masih tetap memiliki peluang untuk berkembang. Di samping itu, pasar tradisional sebenarnya memiliki keunggulan yang mampu menarik pembeli, yakni adanya tawar menawar. Namun adanya *image* pasar tradisional yang kumuh, kotor, sumpek, tidak aman, dan sebagainya akan menjadi kendala sendiri.

Pasar tradisional yang menjadi arena pergulatan hidup mayoritas warga kota menjadi kurang diperhatikan. Kondisi ini dapat mengakibatkan keberadaan pasar tradisional yang biasanya terletak pada pusat-pusat perdagangan yang dipandang dari aspek lokasi umumnya memiliki arti strategis bagi pengembangan usaha dalam lingkungan perkotaan, sedikit demi sedikit mulai tergusur.

Perlu dijelaskan bahwa misi utama penulisan buku ini adalah untuk menyebarkan ilmu dan membuat penulisnya belajar dan belajar lagi. Kesempurnaan isi dan penyajian buku ini tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam penyempurnaan buku ini selanjutnya.

Akhirnya, penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

memberikan bantuannya terselesaikannya buku ini dalam upaya penyebaran bangsa. Amin!

bagai kebutuhan rumah tangga
ur dan sebagainya.

lisional dalam penulisan ini
unya pedagang eceran dan
arang kebutuhan sehari-hari
ih sangat sederhana, tingkat
erta pola bangunan yang apa
an oleh pemerintah daerah

at dikaitkan dengan indikasi
asih dalam transisi menuju

US \$ 1.000,00 maka
lonal masih tetap memiliki
ping itu, pasar tradisional
mampu menarik pembeli,
nun adanya *image* pasar
mpek, tidak aman, dan

li arena pergulatan hidup
diperhatikan. Kondisi ini
e tradisional yang bisanya
yang dipandang dari aspek
bagi pengembangan usaha
i sedikit mulai tergusur.

ama penulisan buku ini
mbuat penulisnya belajar
penyajian buku ini tidak
1, saran dan kritik dari
gat kami harapkan dalam

enghargaan dan ucapan
a semua pihak yang telah

memberikan bantuannya dalam proses penyusunan hingga
terselesaikannya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat
dalam upaya penyebaran ilmu dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Amin!

Makassar, 12 April 2014
Penulis,

Sitti Hasbiah

Daftar Isi

Kata Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ vii

Bab I Merkantilis, Ekonomi Klasik Dan Neoklasik ~ 1

Bab II Ekonomi Kelembagaan ~ 25

Bab III Property Rights ~ 57

Bab IV Eksternalitas, Kegagalan Pasar Dan Property Rights ~ 67

Bab V Pasar Tradisional ~ 85

Bab VI Masalah dan Karakteristik Pedagang Pasar Tradisional ~
105

Bab VII Kinerja Bisnis Pedagang Pasar Tradisional ~ 135

Bab VIII Revitalisasi Pasar Tradisional ~ 117

Daftar Pustaka ~ 139

BAB I

MERKANTILIS, EKONOMI KLASIK DAN
NEOKLASIK

BAB I

MERKANTILIS, EKONOMI KLASIK DAN NEOKLASIK

1.1. Ekonomi Periode Merkantilis

Merkantilism serumpun dengan kata mercantile, merupakan kata sifat yang artinya sesuatu yang terkait dengan dagang atau perdagangan. Satu akar juga dengan kata merchant yang berarti pedagang. Kata merkantilis juga masih terkait dengan mercandise, yaitu perdagangan atau barang-barang yang diperdagangkan. Menurut kamus Inggris Indonesia Peter Salim, merkantilisme adalah sistem ekonomi yang terdapat di Eropa antara tahun 1500 sampai tahun 1700an, yang mementingkan kesimbangan antara ekspor dan impor. Merkantilisme dapat pula diartikan sebagai prinsip atau praktek perdagangan. Merkantilis (mercantilist) adalah penganut merkantilisme atau orang yang percaya mengenai pentingnya perdagangan.

Paham merkantilisme didasarkan pada pentingnya perdagangan. Negara akan kaya dan kuat hanya melalui perdagangan. Merkantilist akan berupaya menghasilkan sebanyak mungkin barang dengan harga murah. Namun, mereka akan membatasi pembelian hanya pada barang bernilai penting dan strategis untuk mengembangkan perdagangan dan pengembangan industri manufaktur. Karena prinsip ini, negara akan berusaha memperbanyak

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

volume ekspor dan menekan impor. Untuk menjalankan prinsip ini, negara menerapkan sistem proteksi ekonomi, dengan tujuan melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri dari serbuan barang impor. Dengan demikian, negara akan memperoleh uang dalam jumlah banyak.

Martin C. Spechler dalam bukunya *Perspectives in Economic Thought*, terbitan India University tahun 1990, menjelaskan negara penganut merkantilisme dalam upaya menambah pundi-pundinya akan menekan konsumsi dalam negeri serendah mungkin. Negara akan menerapkan kebijakan upah buruh semurah-murahnya¹, masyarakat diusahakan hidup pada level subsisten (hanya berproduksi cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum), menghindari pemborosan melalui konsumsi barang mewah, dan menerapkan pajak (upeti) tinggi. Pembangunan dalam negeri hanya diutamakan pada pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan pertanian. Belanja negara terbesar adalah pengadaan kelengkapan persenjataan.

Kekayaan negara hanya dinilai dengan seberapa banyak uang, emas dan perak yang bisa kumpulkan. Dorongan untuk mengumpulkan emas dan perak serta mendapatkan barang murah yang tidak bisa disediakan dalam negeri sendiri begitu besar. Sehingga hal tersebut telah melahirkan kebijakan kolonial, semangat menjajah bangsa lain demi mendapatkan emas, perak dan barang berharga (Spechler, 1990). Karena itu, investasi dalam

¹ Adam Smith dalam bukunya *the Wealth of Nation* menjelaskan selama kurang lebih 2 abad masyarakat Eropa hidup dalam kemiskinan. Selama periode tersebut, upah tidak pernah mengalami peningkatan. Hal ini yang mendorongnya berfikir sehingga lahirnya konsep ekonomi kapitalis.

negeri terbesar ac militer sebagai m kolonial, menund lain. Negara akan tabungannya sup Para buruh dibaya kurang produktif hukuman sekali (Spechler, 1990).

Di dalam kebijakan yang oleh para saudag perdagangan. Unt sistem pemerintah raja dan para elit dilaksanakan ole dibayar untuk m yang mendukung polisi, hakim, pa kepentingan kek para penentang, dibatasi dengan l menangani hut Pengaruh politik demikian, peng pedagang (mercl saling menguntu

Sistem digambarkan di eropa pada tahu

impor. Untuk menjalankan sistem proteksi ekonomi, pentingnya ekonomi dalam impor. Dengan demikian, dalam jumlah banyak.

Di bukunya *Perspectives in Mercantilism* tahun 1990, David H. Landes menjelaskan tentang merkantilisme dalam upaya meningkatkan konsumsi domestik. Negara akan berusaha semurah-murahnya¹, menjaga level subsisten (hanya memenuhi kebutuhan fisik) dengan pajak (upeti) tinggi. Kebijakan yang diutamakan pada belanja negara terbesar adalah untuk memperkuat persenjataan.

Hal ini dinilai dengan seberapa banyak yang bisa dikumpulkan. Emas dan perak serta barang yang tidak bisa disediakan di rumah. Sehingga hal tersebut sangat mahal, semangat menjajah untuk emas, perak dan barang-barang itu, investasi dalam

¹ *Wealth of Nation* menjelaskan bahwa Eropa hidup dalam kemiskinan. Setelah perang mengalami peningkatan. Hal ini adalah konsep ekonomi kapitalis.

negara terbesar adalah untuk memperkuat persenjataan militer sebagai modal untuk mengembangkan wilayah kolonial, menundukkan dan merampas kekayaan negara lain. Negara akan menghalalkan segala cara demi menjaga tabungannya supaya tidak berkurang (Skousen, 2005). Para buruh dibayar murah. Mereka yang menentang atau kurang produktif dikirim ke negara jajahan sebagai hukuman sekaligus menjaga kepentingan kolonial (Spechler, 1990).

Di dalam negeri, pemerintah menerapkan kebijakan yang mendukung monopoli. Pasar dikuasai oleh para saudagar yang menguasai kekayaan dan jalur perdagangan. Untuk mendukung itu, negara menerapkan sistem pemerintah terpusat. Kekuasaan berpusar sekitar raja dan para elit politik kepercayaan. Pemerintahan dilaksanakan oleh para birokrat yang loyal dan mau dibayar untuk menjalankan sistem perundang-undangan yang mendukung kehendak pemerintah pusat. Jaksa, polisi, hakim, para diplomat, dan militer bekerja demi kepentingan kekuasaan (Spechler, 1990). Ruang gerak para penentang, kaum intelektual, tuan tanah (feudal), dibatasi dengan ketat. Peran gereja dimarginalkan hanya menangani hubungan manusia dengan tuhan. Pengaruh politik mereka benar-benar dikebiri. Namun demikian, penguasa berkolaborasi dengan kaum pedagang (merchan), mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan.

Sistem ekonomi merkantil sebagai digambarkan di atas mendominasi perekonomian di Eropa pada tahun 1500an hingga 1700an. Ratu Elizabeth

dari Inggris, Louis XIV dari Perancis, Frederick the Great dari Prusia (Jerman), Peter the Great dari Rusia, Maria Theresa serta Joseph dari Austria merupakan penguasa pendukung sistem ekonomi merkantilisme pada masa awal kebangkitan daratan Eropa. Namun demikian, kekayaan negara yang melimpah yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan tersebut hanya dapat dinikmati oleh para penguasa dan kaum pedagang. Sedangkan rakyat kebanyakan tetap hidup dalam kemiskinan, kekurangan dan kebodohan. Inilah yang mendorong seorang Profesor kelahiran Skotlandia, Dr. Adam Smith, berfikir keras. Ia melihat suatu keadaan yang sangat tidak adil. Kaum buruh tidak pernah mengalami kenaikan upah selama kurang lebih 200 tahun terakhir. Renungannya membuahkan hasil yaitu buku setebal 1000 halaman yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, diterbitkan pada tahun 1776. Buku ini dianggap sangat fenomenal karena berisikan pandangan-pandangan filosofis dan mendasar serta menyajikan formula umum bagaimana mencapai kesejahteraan yang riil yang dirasakan oleh setiap warga negara tanpa kecuali.

1.2. Periode Ekonomi Liberal dan Teori Ekonomi Klasik

1.2.1 Pandangan Adam Smith vs Merkantilisme

Para pakar sejarah pemikiran ekonomi menganggap tahun 1776 sebagai tahun kelahiran teori ekonomi klasik. Pasalnya, pada tahun tersebut terbit buku maha karya Adam Smith, seorang profesor filsafat moral dari Glasgow University. Buku yang dikenal dengan judul

the Wealth of the Nation sangat berpengaruh sehingga merevolusi cara pandang pembuat kebijakan. Buku ini juga telah membahas bagaimana membangun hanya mengumpulkan meletakkan dasar dan kesejahteraan bersama. penguasa dan kaum pandangan-pandangan relevan kendati sempat mendapat serangan dan lawannya.

Model yang di dalam mewujudkan kebebasan alamiah. In ekonomi klasik. In sebagaimana berlaku dianggap hanya milik pemegang monopoli pertumbuhan ekonomi pengumpulan emas dan bukan hanya didapatkan tanah, lahan dan sumber tersebut. Ia mengatakan "Kemakmuran sebuah emas dan perak, gedungnya, dan dikonsumsi". Rakyat

melakukan apa yang diinginkan tanpa campur tangan negara. Biarkanlah barang, tenaga kerja, modal dan uang mengalir secara bebas. Menurut Smith, kebebasan semacam ini merupakan hak azasi paling mendasar. Ia mengatakan:

Melarang banyak orang melakukan apa-apa yang bisa mereka lakukan dalam bidang produksi, atau melarang orang menggunakan modal dan industri dengan cara yang mereka nilai paling menguntungkan bagi mereka adalah sebuah pelanggaran nyata bagi hak azasi manusia.

Secara ringkas inti ajaran *Wealth of Nations* dari Adam Smith:

1. kebebasan (freedom): hak untuk memproduksi, menukarkan, memperdagangkan, barang, tenaga kerja dan modal (kapital)
2. kepentingan diri sendiri (self interest), hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu orang lain
3. persaingan (competition), hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa

Ketiga unsur kebebasan tadi akan menciptakan harmoni alamiah antara kepentingan buruh, pemilik tanah, dan pemilik modal. Kepentingan diri sendiri disertai dengan keinginan membantu sesama akan mampu mengentaskan ekonomi jutaan umat manusia. Doktrin kepentingan diri yang demikian dianggap invisible hand (tangan gaib) yang mengarahkan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keadaan semacam ini akan tercapai dalam kondisi yang ideal.

Yaitu, suatu kondisi nilai kebaikan, kedegasan yang melarang adil. Karena itu, Si kelembagaan masyarakat, dan hukum disiplin diri serta kebebasan mengeja diajarkan Smith ha masyarakat yang terciptanya keadilar

Pemikiran Smith semangat revolusi pemikiran tersebut tatanan dunia baru yang proteksionis mengalami kehancuran tumbuh luar biasa. Dari kemiskinan m tumbuh seiring den

Specher (1990) ekonomi klasik, yai

1. pembagian a menyediakan i menyediakan w menyediakan Masing-masing potensinya. D mendapatkan sebagian dari

Yaitu, suatu kondisi masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, kedermawanan, dan hukum sipil yang tegas yang melarang praktek usaha yang curang dan tidak adil. Karena itu, Smith sangat mendukung terciptanya kelembagaan masyarakat (social institution) - pasar, agama, dan hukum- untuk memperkuat kontrol dan disiplin diri serta kedermawanan. Dengan demikian, kebebasan mengejar kepentingan diri sendiri yang diajarkan Smith harus dibingkai dengan kelembagaan masyarakat yang kuat yang mengarahkannya pada terciptanya keadilan.

Pemikiran Smith sangat berpengaruh. Bersama dengan semangat revolusi industri dan kebebasan berpolitik, pemikiran tersebut mampu menggerakkan dunia menuju tatanan dunia baru. Sistem kapitalis. Sistem merkantilis yang proteksionis kehilangan pengaruh. Akhirnya mengalami kehancuran. Duniapun berubah. Ekonomi tumbuh luar biasa. Impian masyarakat eropa untuk keluar dari kemiskinan menemukan jalan. Harapan hidup pun tumbuh seiring dengan tumbuhnya ekonomi.

Specher (1990) merangkum empat prinsip utama ekonomi klasik, yaitu:

1. pembagian aktor ekonomi, yaitu pemodal menyediakan modal kerja dan peralatan, buruh menyediakan waktu dan upaya, serta pemilik lahan menyediakan barang mentah dan lahan usaha. Masing-masing pihak dituntut memaksimalkan potensinya. Dengan demikian, pemilik modal mendapatkan keuntungan dari usahanya, yang sebagian dari keuntungan tersebut diinvestasikan

untuk memperbesar skala usaha. Kaum buruh mendapatkan upah yang sebagian disisihkan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Pemilik lahan mendapatkan pemasukan dari sewa lahan dan penggunaan bahan mentah. Pembagian kerja tersebut mampu menggerakkan manusia untuk lebih produktif dan semangat untuk mencapai kesejahteraan.

2. kebebasan individu untuk berbuat sesuai dengan kepentingannya, misal, mendapatkan keuntungan material. Hal ini akan membuat individu tersebut dinamis dan bersemangat berupaya terus untuk lebih produktif. Motif mencari keuntungan tersebut merupakan invisible hand yang mampu menggerakkan permintaan (demand) dan penawaran (supply) pada titik kesetimbangan. Dan, terjadilah transaksi dan pertukaran yang bersifat alamiah.
3. Kompetisi memaksimalkan pendapatan. Para penggagas ekonomi klasik yakin bahwa kompetisi akan mampu mempersempit perbedaan pendapatan. Buruh akan berusaha meningkatkan kemampuan agar mendapatkan imbalan yang baik. Mereka pun akan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain bersaing mendapatkan lapangan pekerjaan. Demikian juga, dengan kapital akan bergerak mengalir mengikuti mekanisme pasar.
4. Peran negara yang minim. Hal ini untuk menjamin bahwa pasar akan bersifat terbuka dan adil. Praktek monopoli dihilangkan, dan negara harus membuat aturan main yang memungkinkan pasar bebas bisa terjadi.

Sedangkan Skousen ajaran ekonomi klasik A

1. penghematan, ker kedermawanan terl kebajikan, karenanya
2. Pemerintah harus pengaturannya kead mempertahankan neq
3. Dalam bidang ekor kebijakan laissez fai bebas, pajak rendah,
4. Standard klasik em mendepresiasi mata lingkungan moneter berkembang

Untuk memahami merkantilis dan ekono ikhtisar perbedaan ant (1990):

usaha. Kaum buruh sebagian disisihkan untuk kerja. Pemilik lahan dari sewa lahan dan Pembagian kerja tersebut sia untuk lebih produktif ai kesejahteraan.

berbuat sesuai dengan endapatkan keuntungan mbuat individu tersebut rupaya terus untuk lebih keuntungan tersebut ng mampu menggerakkan penawaran (supply) pada terjadilah transaksi dan niah.

an pendapatan. Para yakin bahwa kompetisi t perbedaan pendapatan. katkan kemampuan agar baik. Mereka pun akan ke tempat lain bersaing kerjaan. Demikian juga, rak mengalir mengikuti

Hal ini untuk menjamin terbuka dan adil. Praktek negara harus membuat kinkan pasar bebas bisa

Sedangkan Skousen (2001) menangkap empat esensi ajaran ekonomi klasik Adam Smith, yaitu:

1. penghematan, kerja keras, kepentingan diri, kedermawanan terhadap orang lain merupakan kebajikan, karenanya perlu didukung
2. Pemerintah harus membatasi kegiatannya pada pengaturannya keadilan, melindungi hak milik, dan mempertahankan negara dari serangan asing
3. Dalam bidang ekonomi, negara harus mengadopsi kebijakan laissez faire, non intervensi (perdagangan bebas, pajak rendah, birokrasi minimal)
4. Standard klasik emas/perak akan mencegah negara mendepresiasi mata uang dan akan menghasilkan lingkungan moneter yang stabil dimana ekonomi bisa berkembang

Untuk memahami secara mudah perbedaan sistem merkantilis dan ekonomi klasik berikut disampaikan ikhtisar perbedaan antara keduanya menurut Specher (1990):

Tabel Perbedaan antara Merkantilis dan Klasik

Merkantilis	Ekonomi Klasik
- memandang dunia secara statis	- memandang dunia secara dinamis terutama terkait dengan pengembangan pasar
- orientasi negara/pemerintah	- individualistis
- peraturan diperlukan untuk menghadapi pihak yang tidak peduli	- laissez faire (non intervensi pemerintah)
- menekankan pada pasar luar negeri	- orientasi pasar dalam negeri
- pengangguran yang kronis	- pengangguran bersifat sementara
- pertumbuhan dengan cara menumpuk kekayaan, menambah persediaan uang	- pertumbuhan melalui investasi, meningkatkan tabungan, penghematan, akumulasi keuntungan
- mendukung kelahiran, populasi yang besar penting sebagai penyedia tenaga kerja	- khawatir dengan pertumbuhan populasi

Adam Smith menciptakan teori ekonomi klasik tidak berangkat dari keadaan vakum. Ia dipengaruhi oleh beberapa pemikir dan filsuf ulung sebelumnya. Skousen (2001) menyampaikan beberapa pemikir yang dianggap mempengaruhi pandangan Adam Smith sebagai berikut:

1. Aristoteles, mengajarkan pentingnya hak milik pribadi yang dianggapnya dapat membuka peluang bagi orang untuk berderma dan cinta sesama
2. Doktrin katolik dan Skolastik Spanyol. Doktrin katolik mengajarkan penghematan, kerja keras, kesederhanaan, mengecam riba, dan kerja tidak

produktif. Skolastik harga barang yang pasar umum. Kaum faire.

3. Montesquieu. Pembah menginspirasi Ada pembagian kerja d Selain itu, pernyataan berdagang akan r kesewenang-wenang

1.2.2. Esensi Pemikiran

Adam Smith (1723 - 1776)

- Persaingan ekonomi
 - Kebebasan alam penerapan tarif
 - Minim intervensi per
 - Pertukaran barang c jasa tersebut memilik
 - Pertukarang didorc mengidentifikasinya kepentingan diri sen
 - Pembagian tenaga k
- David Ricardo (1772 - 1
- Mendukung penuh
 - Menerapkan hukum mendapatkan upah mesin produksi. B

Merkantilisme dan Klasik

Ekonomi Klasik
- memandang dunia secara dinamis terutama terkait dengan pengembangan pasar
- individualistis
- laissez faire (non intervensi pemerintah)
- orientasi pasar dalam negeri
- pengangguran bersifat sementara
- pertumbuhan melalui investasi, meningkatkan tabungan, penghematan, akumulasi keuntungan
- khawatir dengan pertumbuhan populasi

ri ekonomi klasik tidak m. Ia dipengaruhi oleh ung sebelumnya. Skousen : pemikir yang dianggap n Smith sebagai berikut:

tingnya hak milik pribadi membuka peluang bagi ata sesama

Spanyol. Doktrin katolik an, kerja keras, riba, dan kerja tidak

produktif. Skolastik spanyol berpandangan bahwa harga barang yang adil adalah yang didapatkan di pasar umum. Kaum ini juga mendukung azas laissez faire.

3. Montesquieu. Pembagian kekuasaan filsuf ini telah menginspirasi Adam Smith mengenai adanya pembagian kerja dalam pengembangan ekonomi. Selain itu, pernyataan Montesquieu bahwa semangat berdagang akan menurunkan nafsu perang dan kesewenang-wenangan kekuasaan politik

1.2.2. Esensi Pemikiran Ekonomi Klasik

Adam Smith (1723 - 1776):

- Persaingan ekonomi
- Kebebasan alamiah/perdagangan bebas/anti penerapan tarif
- Minim intervensi pemerintah
- Pertukaran barang dan jasa terjadi karena barang dan jasa tersebut memiliki nilai/harga
- Pertukaran didorong oleh invisible hand (Smith mengidentifikasinya sebagai upaya mengutamakan kepentingan diri sendiri)
- Pembagian tenaga kerja

David Ricardo (1772 - 1823):

- Mendukung penuh pemikiran Adam Smith
- Menerapkan hukum upah besi dimana buruh hanya mendapatkan upah subsistent. Buruh seperti mesin-mesin produksi. Buruh harus dibayar murah agar

tidak mencapai hidup sejahtera yang bisa berakibat pada penambahan jumlah populasi.

- Berusaha menemukan nilai tetap atas barang. Menurutnya, nilai barang ditentukan oleh nilai kerja orang dalam memproduksi barang tersebut. Nilai komoditas harus sama dengan jumlah rata-rata dari jam kerja yang dipakai dalam memproduksi barang tersebut. Konsekuensi dari teori nilai kerja adalah kapitalis akan membayar upah rendah, memperkerjakan tenaga kerja anak dan perempuan, dan memperpanjang jam kerja agar mendapatkan keuntungan besar. Upah murah juga dilakukan untuk membatasi peningkatan kesejahteraan kaum buruh yang bila meningkat akan meningkatkan jumlah penduduk.
- Mengembangkan model-model matematik yang sarat asumsi dan rumus-rumus abstrak
- Mendukung kebijakan moneter anti inflasi yang ketat. Bank sentral harus membatasi jumlah uang yang beredar
- Mengembangkan hukum keuntungan komparatif. Hukum ini merupakan pukulan telak bagi proteksionisme. Menurutnya, perdagangan bebas antar negara akan meningkatkan output total produk. Memproduksi dan memenuhi sendiri kebutuhan sendiri dengan membatasi import tidak akan menguntungkan. Perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak.

- Bersama thomas M berpendapat yang lahan dalam mengl akan menurun. Pen modal tidak akan lahan dengan luas y

Jean Baptiste Say (1767

- Laissez faire, laissez biarkanlah yang ba kebebasan alamiah Adam Smith
- Menyusun penguj observasi. Ini r pendekatan teoritis dari fakta
- Menyusun teori u nilai kerjanya / mengatakan: nilai subjektif oleh kon yang menentukan diproduksi. Nam dalam menentukan biaya perubahan ir
- Permintaan dan elastisitas penawa diprediksi secara p
- Pengusaha (entre membangun ekon penting oleh Adar

jahtera yang bisa berakibat populasi.

nilai tetap atas barang. ditentukan oleh nilai kerja dari barang tersebut. Nilai rata-rata dari alam dalam memproduksi dari nilai kerja membayar upah rendah, kerja anak dan perempuan, kerja agar mendapatkan urah juga dilakukan untuk kesejahteraan kaum buruh dan meningkatkan jumlah

odel matematik yang sarat abstrak

eter anti inflasi yang ketat. atasi jumlah uang yang

keuntungan komparatif. pukulan telak bagi ya, perdagangan bebas tkan output total produk. ruih sendiri kebutuhan si import tidak akan angan bebas akan pihak.

- Bersama thomas Malthus mengembangkan hukum pendapatan yang berkurang. Menurutny, potensi lahan dalam menghasilkan produk pertanian (corn) akan menurun. Penambahan jumlah tenaga kerja dan modal tidak akan mampu menggenjot produktivitas lahan dengan luas yang sama.

Jean Baptiste Say (1767 - 1832):

- Laissez faire, laissez passer: biarkanlah kami sendiri, biarkanlah yang baik-baik masuk. Ini sejalan dengan kebebasan alamiah dan konsep perdagangan bebas Adam Smith
- Menyusun pengujian teoritis dengan fakta dan observasi. Ini merupakan kritikan pedas atas pendekatan teoritis Ricardo yang dianggapnya jauh dari fakta
- Menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengganti nilai kerjanya Adam Smith dan Ricardo. Ia mengatakan: nilai barang atau jasa ditentukan secara subjektif oleh konsumen; karena itu konsumen pula yang menentukan jumlah barang yang harus diproduksi. Namun, produsen juga berkontribusi dalam menentukan nilai barang melalui akumulasi biaya perubahan input menjadi output
- Permintaan dan penawaran bersifat subjektif, elastisitas penawaran-permintaan tidak pernah bisa diprediksi secara pasti. Ekonomi bersifat kualitatif.
- Pengusaha (entrepreneur) berperan penting dalam membangun ekonomi, dimana hal ini tidak dianggap penting oleh Adam Smith.

- Menciptakan hukum pasar: penawaran menciptakan permintaan, atau penawaran X menciptakan permintaan Y. Ilustrasi: petani yang menjual hasil panen X menyebabkan petani tersebut punya uang untuk membeli komoditas selain X. Contoh lain. Bisnis yang menguntungkan akan menciptakan pekerjaan dan permintaan atas barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dimulai dengan meningkatkan produktifitas. Pengeluaran produksi harus selalu di atas konsumsi. Untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, maka pemerintah negara tersebut harus mendorong produktifitas yang tinggi, maka pasar akan mengikuti.

Ringkasan hukum pasar Say:

- Sebuah negara tidak bisa punya terlalu banyak kapital
- Investasi merupakan basis pertumbuhan ekonomi
- Konsumsi bukan hanya tidak menambah kekayaan tapi bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi
- Permintaan disebabkan oleh produksi/penawaran
- Kekurangan permintaan (over produksi) bukan penyebab gangguan ekonomi. Gangguan dalam perekonomian hanya terjadi jika barang tidak diproduksi dalam proporsi yang tepat.

1.3 Pemikiran Ekonomi Sosialis

Karl Marx:

- Mendukung teori nilai kerja tapi menggunakannya untuk menyerang sistem ekonomi kapitalis yang ia anggap menuntungkan kaum kapitalis dan pemilik lahan. Margin keuntungan yang dikumpulkan oleh

kaum pemilik modal atas hak-hak kaum bu

- Penghapusan pemilikan
- Pajak pendapatan yang
- Penghapusan semua h
- Penyitaan properti em
- Sentralisasi kredit menggunakan bank 1 dan monopoli eksklusif
- Sentralisasi alat-alat 1 tangan negara
- Perluasan pabrik-pat negara
- Menanami tanah-tanal
- Meningkatkan kesubu
- Kewajiban yang setara
- Pembentukan tentan pertanian
- Kombinasi agrikulture
- Penghapusan bertaha dengan distribusi ya penduduk negeri
- Pendidikan gratis untu
- Penghapusan tenaga k

1.4. Esensi Pemikiran Ek

r: penawaran menciptakan
tawaran X menciptakan
petani yang menjual hasil
petani tersebut punya uang
selain X. Contoh lain. Bisnis
in menciptakan pekerjaan
ng dan jasa. Pertumbuhan
meningkatkan produktifitas.
is selalu di atas konsumsi.
omi suatu negara, maka
ebut harus mendorong
aka pasar akan mengikuti.

nya terlalu banyak kapital

ertumbuhan ekonomi

lak menambah kekayaan

rtumbuhan ekonomi

produksi/penawaran

(over produksi) bukan

omi. Gangguan dalam

adi jika barang tidak

yang tepat.

lis

ja tapi menggunakannya

onomi kapitalis yang ia

m kapitalis dan pemilik

yang dikumpulkan oleh

kaum pemilik modal dianggap sebagai perampasan
atas hak-hak kaum buruh

- Penghapusan pemilikan tanah pribadi
- Pajak pendapatan yang progressif
- Penghapusan semua hak warisan
- Penyitaan properti emigran dan pemberontak
- Sentralisasi kredit ditangan negara dengan menggunakan bank nasional dengan modal negara dan monopoli eksklusif
- Sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara
- Perluasan pabrik-pabrik dan alat produksi milik negara
- Menanami tanah-tanah yang menganggur
- Meningkatkan kesuburan tanah
- Kewajiban yang setara bagi semua pekerja
- Pembentukan tentara industri khususnya bagi pertanian
- Kombinasi agrikulture dan manufakture
- Penghapusan bertahap perbedaan kota dan desa dengan distribusi yang lebih seimbang ke seluruh penduduk negeri
- Pendidikan gratis untuk semua anak di sekolah publik,
- Penghapusan tenaga kerja anak-anak dipabrik

1.4. Esensi Pemikiran Ekonomi Neo Klasik

William Stanley Jevon, Leon Walras, Carl Menger
(Mazhab Austria)

Lahir dari kebuntuan ekonomi klasik yang tidak mampu menyajikan kerangka teoritis yang kuat bagaimana kebebasan ekonomi dan intervensi pemerintah yang minim mampu mendistribusikan kekayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keyakinan adanya invisible hand tidak ditopang oleh landasan pemikiran teoritis yang jelas. Selain itu, konsep nilai komoditas yang didasarkan pada nilai kerja bertentangan dengan teori ekonomi Marxian. Upaya Ricardo mencari nilai intrinsik dari barang mengalami kebuntuan. Ilmu ekonomi menjadi muram. Sampai akhirnya William Stanley Jevon (Inggris), Leon Walras (Perancis) dan Carl Menger (Austria) menemukan teori utilitas marginalis pada waktu yang hampir bersamaan.

Ketiga ekonom ini menolak pendapat bahwa nilai suatu komoditas ditentukan secara objektif oleh nilai biaya produksi (meliputi nilai kerja). Sebaliknya, mereka berkeyakinan bahwa nilai komoditas ditentukan secara subjektif oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan dan kesukaannya. Biaya produksi dan tenaga kerja sama sekali tidak menentukan nilai suatu komoditas. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa nilai tersebut bersifat menurun seiring dengan penurunan kebutuhan manusia atasnya. Atau pada saat barang tersebut melimpah maka nilainya menjadi berkurang. Satu gelas air di Padang Pasir bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan satu gelas air di Indonesia. Ringkasnya, harga produk ditentukan oleh konsumen berdasarkan atas banyak atau sedikitnya

persediaan produk tersebut memecahkan kebuntuan yang dihadapi oleh Adam Smith dan para ekonom klasik. Carl Menger orang Austria dan ia mengembangkan temuan ini menjadi aliran/mazhab Austria.

Mazhab Austria menentang kebebasan alamiah Adam Smith.

- Asal usul nilai konsumen didasarkan pada anggapan bahwa permintaan akan barang tergantung pada struktur dan harga produksi dengan teori imputasi utilitas (manfaat) marginal.
- Utilitas/biaya marginal, pada margin - dengan demikian berguna untuk pembeli dan penjual.
- Nilai subjektif, nilai barang ditentukan secara subjektif oleh konsumen.

Teori Imputasi:

Sebelum teori ini barang menjadi tiga macam, yaitu barang yang memuat tenaga kerja, barang kedua, yaitu barang yang merupakan proses produksi; dan barang ketiga, yaitu barang seperti gandum, kapas, dan sebagainya. Barang pertama memuaskan kebutuhan manusia, barang kedua dan ketiga. Harga barang ditentukan atas barang perbandingan yang menghilangkan/menguraikan

Leon Walras, Carl Menger

ekonomi klasik yang tidak mengka teoritis yang kuat ni dan intervensi pemerintah stribusikan kekayaan untuk masyarakat. Keyakinan k ditopang oleh landasan s. Selain itu, konsep nilai ada nilai kerja bertentangan an. Upaya Ricardo mencari mengalami kebuntuan. Ilmu Sampai akhirnya Willian Walras (Perancis) dan Carl n teori utilitas marginalis maan.

olak pendapat bahwa nilai secara objektif oleh nilai kerja). Sebaliknya, mereka noditas ditentukan secara ai dengan kebutuhan dan an tenaga kerja sama sekali 1 komoditas. Lebih jauh nilai tersebut bersifat uanan kebutuhan manusia ; tersebut melimpah maka u gelas air di Padang Pasir n dengan satu gelas air di produk ditentukan oleh banyak atau sedikitnya

persediaan produk tersebut. Penemuan ini telah memecahkan kebuntuan yang telah membuat Adam Smith dan para ekonom klasik frustrasi. Karena Carl Menger orang Austria dan ia yang paling dominan dalam mengembangkan temuan ini maka temuan ini disebut aliran/mazhab austria.

Mazhab Austria menghidupkan kembali pemikiran kebebasan alamiah Adam Smith melalui tiga cara:

- Asal usul nilai konsumen. Mazhab ini berkeyakinan bahwa permintaan akhir konsumen menentukan struktur dan harga proses produksi. Hal ini disebut dengan teori imputasi (theory of inputation), yaitu utilitas (manfaat) menciptakan input.
- Utilitas/biaya marginal, yaitu harga barang ditentukan pada margin - dengan keuntungan/biaya marginal untuk pembeli dan penjual
- Nilai subjektif, nilai barang sepenuhnya ditentukan secara subjektif oleh konsumen

Teori Imputasi:

Sebelum teori ini lahir, Menger mengklasifikasi barang menjadi tiga macam: barang konsumen akhir, yaitu barang yang memuaskan kebutuhan konsumen; barang kedua, yaitu barang yang dibutuhkan dalam proses produksi; dan barang ketiga, yaitu bahan mentah seperti gandum, kapas, dan bulu domba. Kebutuhan akan barang pemuas kebutuhan memunculkan kebutuhan atas barang kedu dan ketiga. Hilangnya kebutuhan manusia atas barang pemuas kebutuhan akan menghilangkan/mengurangi kebutuhan/permintaan atas

barang kedua dan ketiga. Bila semua orang tidak suka roko, maka kebutuhan akan tembakau, kertas dan bahan tambahan lain akan menurun. Dan barang-barang itu akan kehilangan nilainya. Dengan demikian, kebutuhan akan barang/faktor-faktor produksi akan sangat tergantung pada kebutuhan akhir konsumen.

Teori Marginalitas:

Dari kasus rokok atas, lahan dan alat produksi daun tembakau seperti pembajak tanah dan cangkul kebun, tidak kehilangan nilainya sama sekali. Tapi mengalami penurunan. Ia akan kembali memiliki nilai guna jika telah kembali dimanfaatkan untuk kegiatan produksi komoditas lain. Dengan kata lain, nilainya akan terus menurun sampai menemukan nilai guna alternatif yang lebih baik. Dengan demikian, harga suatu barang didasarkan pada penggunaan margin atau penggunaan selanjutnya yang lebih baik. Dari sini kemudian lahir konsep biaya oportunitas (opportunity cost).

Teori Nilai Subjektif:

Teori ini hanya menegaskan bahwa nilai intrinsik barang yang dicari-cari ekonom klasik tidak pernah ada dimuka bumi. Nilai barang bersifat subjektif ditentukan oleh konsumen akhir. Permintaan konsumenlah yang menaikkan dan menurunkan nilai suatu komoditas.

Teori Kapital Eugen Boehm Bawerk:

Pemilik modal (kapitalis) pantas/wajar mengambil keuntungan dengan menetapkan harga jual lebih tinggi dari ongkos produksi karena dua hal:

- Kapitalis harus menggunakan hasil sendiri, sementara buruh upah dan menggunakan mereka
- Kaum kapitalis mengalami kebangkrutan dari sementara kaum buruh demikian.

Kedua pendapat ini menunjukkan menganggap kapitalis buruh.

Alfred Marshall:

Pencetus gagasan diawali dengan perubahan (Political Economy) menurut Marshall juga permintaan/penawaran kuantitatif atas elastisitas dan istilah-istilah lain teknik dan biologi.

Marshall ada mempopulerkan diagram. Menurutnya, keduanya nilai/harga produk dan paham Ricardian dan biaya produksi adalah adanya. Ia tidak bisa dijadikan satu satunya

Bila semua orang tidak suka tembakau, kertas dan bahan lain. Dan barang-barang itu akan rusak. Dengan demikian, kebutuhan akan produksi akan sangat rendah di akhir konsumen.

tanah, tenaga, lahan dan alat produksi akan menjadi lebih murah. Nilai tanah dan cangkul akan sama sekali. Tapi jika kita ingin kembali memiliki nilai, kita harus memanfaatkan untuk kegiatan lain. Dengan kata lain, nilainya akan berkurang. Nilai guna alternatif suatu barang, harga suatu barang, dan margin atau penggunaan. Dari sini kemudian lahir konsep (*opportunity cost*).

Menurut teori klasik, nilai intrinsik suatu barang tidak pernah ada. Nilai suatu barang bersifat subjektif ditentukan oleh keinginan konsumen yang bersedia membayar untuk suatu komoditas.

Contoh:

Seorang petani pantas/wajar mengambil harga jual lebih tinggi jika harga:

- Kapitalis harus menunggu sampai ia bisa menggunakan hasil usahanya untuk kepuasan diri sendiri, sementara kaum pekerja langsung menerima upah dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka
- Kaum kapitalis menanggung resiko kerugian atau kebangkrutan dari kapital yang diinvestasikannya, sementara kaum buruh tidak menghadapi resiko demikian.

Kedua pendapat ini melemahkan tuduhan Marxian yang menganggap kapitalisme telah mengeksploitasi kaum buruh.

Alfred Marshall:

Pencetus gagasan era ilmiah ilmu ekonomi. Hal ini diawali dengan perubahan nama dari ilmu Ekonomi Politik (*Political Economy*) menjadi ilmu Ekonomi (*Economics*). Marshall juga menciptakan grafik/kurva permintaan/penawaran, rumusan matematik, ukuran kuantitatif atas elastisitas permintaan, surplus konsumen dan istilah-istilah lain yang diambil dari ilmu fisika, teknik dan biologi.

Marshall adalah orang pertama yang mempopulerkan diagram penawaran dan permintaan. Menurutnya, keduanya berperan dalam menentukan nilai/harga produk akhir. Pendapat ini memadukan paham Ricardian dan aliran Austria. Menurut Marshall biaya produksi adalah hal yang mutlak dan terukur adanya. Ia tidak bisa diabaikan. Tapi juga tidak bisa dijadikan satu satunya penentu nilai sebuah komoditas.

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

Marshall telah menghubungkan teori marginalitas dan klasik. Marshall juga memperkenalkan teori kesetimbangan penawaran dan permintaan, yaitu titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Ia juga yang memperkenalkan asumsi *ceteris paribus*. Artinya kesetimbangan dicapai dengan asumsi tidak terjadi perubahan pada pendapatan, harga barang substitusi, ekspektasi perdagangan luar negeri tetap tidak berubah. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa dalam jangka panjang harga produk ditentukan oleh biaya produksi.

Elastisitas harga/permintaan juga merupakan temuan lain dari Marshall yang menarik. Temuan ini sangat penting, karena dengan elastisitas maka sensitifitas perubahan harga atas keuntungan yang diperoleh produsen dan perubahan permintaan konsumen atas suatu komoditas tertentu.

Leon Walras:

Menggagas lahirnya teori ekonomi kesejahteraan yang berasal dari *ide laissez faire*. Ekonomi kesejahteraan membahas soal-soal efisiensi, keadilan, pemborosan ekonomi, dan proses politik dalam ekonomi. Walras merupakan salah satu ekonom yang mencoba menggunakan rumus-rumus matematik dan grafik untuk membuktikan hipotesis tertentu dalam ekonomi kesejahteraan. General Equilibrium merupakan salah satu temuan terbesarnya. Ia mengatakan bahwa sistem pasar bebas akan mencapai kesetimbangan umum dimana penawaran akan sama dengan permintaan untuk semua jenis komoditas.

Vilfredo Pareto:

Merumuskan teori dengan optimalitas pada persaingan bebas kesejahteraan/keadilan alokasi sumberdaya tidak orang lebih baik tanpa n

Francis Y. Edgeworth:

Karya besarnya mengenai fungsi utilitas.

Distribusi Ekonomi

Henry George:

Henry George membahas persoalan yang sering dipermainkan harganya sangat mahal menerapkan kebijakan pajak terhadap tanah sama dengan biaya sewa

kan teori marginalitas dan memperkenalkan teori kurva permintaan, yaitu titik potong antara kurva permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan asumsi ceteris paribus. Berbeda dengan asumsi tidak ada pengaruh harga barang impor dan ekspor tetap tidak berpengaruh terhadap harga barang domestik yang ditentukan oleh biaya produksi.

Permintaan juga merupakan faktor yang menarik. Temuan ini menunjukkan bahwa elastisitas permintaan yang diperoleh dari kurva permintaan konsumen atas barang-barang tersebut.

Teori ekonomi kesejahteraan mengemukakan konsep keadilan, pemerataan, efisiensi, keadilan, pemborosan, dan kesejahteraan dalam ekonomi. Walras mengemukakan konsep ekonomi yang mencoba menerapkan metode matematik dan grafik untuk menganalisis masalah tertentu dalam ekonomi. Konsep ini merupakan salah satu dasar dari teori pasar bebas yang akan membahas sistem pasar persaingan umum dimana harga ditentukan oleh permintaan untuk semua barang.

Vilfredo Pareto:

Merumuskan teori optimalisasi yang dikenal dengan optimalitas Pareto. Ia berpendapat bahwa persaingan bebas akan menghasilkan kesejahteraan/keadilan ekonomi yang optimal dimana alokasi sumberdaya tidak dapat diubah untuk membuat orang lebih baik tanpa mengorbankan orang lain.

Francis Y. Edgeworth:

Karya besarnya mengembangkan kurva indiferent dan fungsi utilitas.

Distribusi Ekonomi

Henry George:

Henry George ekonom yang paling semangat membahas persoalan tanah. Menurutnya, harga tanah sering dipermainkan oleh para spekulan sehingga harganya sangat mahal bisa dikendalikan dengan cara menerapkan kebijakan pajak tinggi. Yaitu penerapan pajak terhadap tanah yang tidak diolah yang besarnya sama dengan biaya sewa per bulannya.

BAB II

EKONOMI KELEMBAGAAN

BAB II

EKONOMI KELEMBAGAAN

2.1. Definisi Kelembagaan

Para ilmuwan sosial yang memiliki latar belakang yang beragam mendefinisikan kelembagaan secara beragam menurut sudut pandang keilmuwanannya. Douglas North seorang sejarawan ekonomi terkemuka mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi (North, 1990). Senada dengan North, Schmid (1972) mengartikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sedangkan menurut Schotter (1981), kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang berulang.

Jauh sebelum ketiga ilmuwan di atas, Veblen (1899) seperti yang dikutip XXX (YYY) mengartikan kelembagaan sebagai cara berfikir, bertindak dan mendistribukan hasil kerja dalam sebuah komunitas. Mirip dengan definisi ini diungkapkan oleh Hamilton (1932) yang menganggap kelembagaan merupakan cara

berfikir dan bertindak yang umum dan berlaku, serta telah menyatu dengan kebiasaan dan budaya masyarakat tertentu. Menurut Jack Knight (1992), kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas. Sedangkan Ostrom (1990) mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya. Singkatnya, kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik maupun sosial.

Berdasarkan atas bentuknya (tertulis/tidak tertulis) North (1990) membagi kelembagaan menjadi dua: informal dan formal. Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis. Adat istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi dan sejenisnya dengan beragam nama dan sebutan dikelompokkan sebagai kelembagaan informal. Sedangkan kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan (agreements), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisniss, politik dan lain-lain.

Kesepakatan-kesepakatan yang internasional, nasional, regional dan lokal dalam kelembagaan formal merupakan hasil kesepakatan formal. Perubahan tersebut merupakan perubahan kehidupan dari masyarakat yang lebih kompleks sebagai tuntutan atas terjadinya dinamika kehidupan. Masyarakat modern dengan kehidupannya yang serba kompleks mengalami konflik yang sangat mini sehingga memerlukan peraturan tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat modern dan kehidupannya.

Wolfgang Kasper bukunya berjudul *Institution and Public Policy* Edisi kedua berdasarkan atas proses interaksi yaitu internal dan eksternal adalah institusi yang terbentuk seperti nilai-nilai kearifan lokal. Institusi eksternal adalah institusi yang terbentuk di luar/ketiga yang kemudian mempengaruhi komunitas tertentu. Rumpun ini termasuk external institusi.

Apapun bentuknya, institusi eksternal ataupun internal berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan derajat kepastian.

g umum dan berlaku, serta saan dan budaya masyarakat it (1992), kelembagaan adalah ing membangun struktur nunitas. Seauangkan Ostrom agaan sebagai aturan yang (arena) yang menentukan it keputusan, tindakan apa dilakukan, aturan apa yang it, prosedur apa yang harus g mesti atau tidak boleh apa yang individu akan idakan yang dilakukannya. ih aturan main yang berlaku disepakati oleh anggota sesuatu yang harus diikuti atan sanksi) dengan tujuan epastian interaksi di antara Interaksi yang dimaksud ni, politik maupun sosial.

nya (tertulis/tidak tertulis) lembaga menjadi dua: lembaga informal adalah laannya di masyarakat t istiadat, tradisi, pamali, jenisnya dengan beragam kan sebagai kelembagaan lembaga formal adalah i perundang-undangan, perjanjian kontrak, peraturan politik dan lain-lain.

Kesepakatan-kesepakatan yang berlaku baik pada level internasional, nasional, regional maupun lokal termasuk ke dalam kelembagaan formal. Terkadang kelembagaan formal merupakan hasil evolusi dari kelembagaan informal. Perubahan tersebut merupakan reaksi atas perubahan kehidupan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks. Bisa juga dikatakan sebagai tuntutan atas terjadinya perubahan zaman dan dinamika kehidupan. Masyarakat tradisional dengan kehidupannya yang serba sederhana dengan potensi konflik yang sangat minim tentu tidak membutuhkan peraturan tertulis yang rinci. Lain halnya dengan masyarakat modern dengan segala kompleksitas kehidupannya.

Wolfgang Kasper dan Manfred Streit dalam bukunya berjudul *Institutional Economics, Social Order and Public Policy* Edisi 1998 membagi kelembagaan berdasarkan atas proses kemunculannya menjadi dua, yaitu internal dan external institutions. Internal institution adalah institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Institusi eksternal adalah institusi yang dibuat oleh pihak luar/ketiga yang kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu. Regulasi produk pemerintah termasuk external institutions.

Apapun bentuknya, baik formal maupun informal, eksternal ataupun internal kelembagaan bertujuan mengurangi ketidakpastian melalui pembentukan struktur/pola interaksi (North, 1992). Atau untuk meningkatkan derajat kepastian dalam interaksi antar

individu (Kasper dan Sterit, 1998). Sedangkan menurut Ostrom (1990) tujuan kelembagaan adalah untuk mengarahkan perilaku individu menuju arah yang diinginkan oleh anggota masyarakat serta untuk meningkatkan kepastian dan keteraturan dalam masyarakat serta mengurangi perilaku oportunistik. Selain itu, kelembagaan juga harus dapat membatasi perilaku manusia yang cenderung berfikir strategik, rasional dan mengutamakan kepentingan diri sendiri; serta harus mampu mendistribusikan sumberdaya ekonomi secara adil dan merata (Libecap, 1989).

Banyak kalangan yang menyamakan kelembagaan/institusi dengan organisasi. Penyamaan ini tidak mutlak salah tapi juga tidak selalu benar tergantung pada konteksnya. Namun, untuk keperluan analisis keduanya harus dibedakan secara jelas. Menyamakan kelembagaan dengan organisasi dalam konteks ekonomi kelembagaan adalah menyesatkan. Dan hal ini telah banyak ditemukan dalam karya ilmiah yang melakukan analisis kelembagaan namun salah sasaran.

North (1990) mendefinisikan organisasi sebagai bangunan/wadah tempat manusia berinteraksi, seperti organisasi politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, olah raga dan lain-lain. Yaitu, kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut sebagai kepentingan bersama. North mengilustrasikan organisasi dengan tim olah raga (sepak bola, bola basket) dimana banyak orang terlibat baik sebagai pelatih, pengurus organisasi, pemain, dan lain-lain dengan tujuan bagaimana memenangkan setiap

pertandingan. Sedangkan peraturan yang berlaku harus ditaati baik oleh stakeholder lainnya. Hal ini dapat menyebabkan pertandingan tidak akan tercapai.

Perguruan tinggi dalam pengertian organisasi dimana mahasiswa, dosen, dan anggota dari organisasi mendidik mahasiswa bermoral dan punya integritas dan menyebarkan hasil pengetahuan terus berkembang sebagai kesempatan untuk penelitiannya pada mahasiswa stakeholder kampus agar berjalan dengan baik. Diperlukan aturan main stakeholder dengan jelas dengan dan bertanggung aturan main tersebut tersebut merupakan organisasi keagamaan Masjid, Dewan Gereja Muhamaddiyah dan lain-lain pengertian organisasi memiliki aturan main yang ditetapkannya.

it, 1998). Sedangkan menurut lembaga adalah untuk individu menuju arah yang masyarakat serta untuk dan keteraturan dalam perilaku oportunistis. Selain itu dapat membatasi perilaku berfikir strategis, rasional dan diri sendiri; serta harus sumberdaya ekonomi secara 9).

yang menyamakan organisasi. Penyesuaian ini tidak selalu benar tergantung untuk keperluan analisis secara jelas. Menyesuaikan organisasi dalam konteks ekonomi. Dan hal ini telah ilmiah yang melakukan adalah sasaran.

visikan organisasi sebagai manusia berinteraksi, seperti keagamaan, pendidikan, olah raga, dan individu yang terikat berupaya untuk mencapai kemenangan bersama. North dan tim olah raga (sepak bola) banyak orang terlibat baik organisasi, pemain, dan lain-lain ia memenangkan setiap

pertandingan. Sedangkan lembaga adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati baik oleh pemain, pelatih maupun stakeholder lainnya. Ketidakjelasan lembaga akan menyebabkan pertandingan berjalan kacau dan tujuan memenangkan setiap pertandingan yang ditargetkan oleh tim tidak akan tercapai dengan baik.

Perguruan tinggi merupakan lembaga/institusi dalam pengertian organisasi. Ada struktur kepengurusan dimana mahasiswa, dosen dan pegawai merupakan anggota dari organisasi tersebut. Tujuannya adalah mendidik mahasiswa agar menjadi manusia pandai; bermoral dan punya integritas diri; melakukan penelitian dan menyebarkan hasil penelitian tersebutnya agar ilmu pengetahuan terus berkembang; mengadakan pengabdian sebagai kesempatan untuk mengimplementasikan hasil penelitiannya pada masyarakat; dan mensejahterakan stakeholder kampus agar ketiga tujuan tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan aturan main yang jelas dimana setiap stakeholder dengan penuh kesadaran merasa terikat dengan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan aturan main tersebut dengan baik. Dan, aturan main tersebut merupakan lembaga. Demikian juga dengan organisasi keagamaan seperti Dewan Kesejahteraan Masjid, Dewan Gereja Indonesia, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain merupakan lembaga dalam pengertian organisasi. Masing-masing organisasi ini memiliki aturan main yang jelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya.

Alih-alih mempertentangkan pengertian institusi sebagai organisasi dan aturan main sebagaimana Douglas North lakukan, Uphopf (2002) mengkasifikasi institusi ke dalam tiga kelompok, yaitu institusi yang bukan organisasi, institusi yang organisasi dan sebaliknya (organisasi juga institusi), dan organisasi yang bukan institusi. Sistem kepemilikan lahan (land tenure system), hukum, pernikahan, uang, dan daya tawar kelompok (collective bargaining power) merupakan contoh kelompok pertama; keluarga, mahkamah agung, dan bank nasional (seperti Bank Indonesia) contoh yang kedua; dan bank daerah, perusahaan dan organisasi penyedia jasa konsultan merupakan contoh organisasi yang bukan institusi.

Organisasi dan institusi juga dapat dilihat dari derajat kekuatan dan kelemahannya. Sebuah organisasi dikatakan kuat (well organized) jika ia tertata dengan baik, produktif efisien, dan tangguh. Jika sebaliknya, maka ia dikatakan organisasi yang lemah (less/weak organized). Demikian juga dengan institusi dikatakan kuat (more institutionalized) jika dapat berjalan dengan baik, well enforced, respected, dan effective. Dan, dikatakan institusi yang lemah, kurang melembaga (less institutionalized) jika menunjukkan keadaan sebaliknya.

Dari definisi dan contoh-contoh di atas nampak jelas ada perbedaan makna antara institusi dan organisasi. Perbedaan pengertian ini sangat penting dalam konteks ekonomi kelembagaan di mana lembaga dalam arti aturan main akan sangat berpengaruh terhadap performansi/kinerja organisasi. Efektifitas/kuat tidaknya

suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh aturan main yang mengikat setiap orang dalam organisasi tersebut.

2.2. Karakteristik Kelembagaan

Institusi bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah. Perubahan yang terjadi dalam kelembagaan dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan. Berdasarkan atas cepat atau lambat perubahan tersebut, Williamson menganalisis perubahan kelembagaan pada tiga tingkatan (Williamson, 1985): 1) kelembagaan yang terwujud pada level masyarakat (masyarakat), 2) level kelembagaan (institutional environment) (governance) dan 4) perubahan pada level perusahaan (Gambar 1). Yang dimaksud dengan kelembagaan pada level masyarakat adalah kebiasaan, tradisi, hukum, dan adat istiadat yang dianggap sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku ekonomi. Perubahan kelembagaan dapat berwujud dalam bentuk yang sangat lama, antara 100 dan 200 tahun.

Kedua, perubahan kelembagaan yang terjadi dalam lingkungan kelembagaan (Williamson, 2000), yang dimaksud dengan kelembagaan yang telah ada sebelumnya secara sengaja seperti per-

angka pengertian institusi (main) sebagaimana Douglas (1983) mengklasifikasi institusi ke dalam institusi yang bukan organisasi dan sebaliknya organisasi yang bukan lahan (*land tenure system*), dan daya tawar kelompok (*power*) merupakan contoh mahkamah agung, dan bank (negara) contoh yang kedua; dan organisasi penyedia jasa kesehatan organisasi yang bukan

ini juga dapat dilihat dari kekuatannya. Sebuah organisasi yang kuat (strong) jika ia tertata dengan baik dan tangguh. Jika sebaliknya, organisasi yang lemah (*less/weak*) organisasi dikatakan kuat atau dapat berjalan dengan baik, dan dikatakan lemah (*less effective*). Dan, dikatakan lemah (*less effective*) dalam keadaan sebaliknya.

Contoh di atas nampak bahwa institusi dan organisasi yang kuat sangat penting dalam konteks organisasi lembaga dalam arti bahwa lembaga berpengaruh terhadap Efektifitas/kuat tidaknya

suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan aturan main yang mengikat setiap anggota dari organisasi tersebut.

2.2. Karakteristik Kelembagaan

Institusi bersifat dinamis. Keberadaannya dalam sebuah komunitas selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliver Williamson menganalisis perubahan institusi dalam empat tingkatan (Williamson, 2000), yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada: 1) level social (masyarakat), 2) level kelembagaan formal (*formal institutional environment*), 3) level tata kelola (*governance*) dan 4) perubahan bersifat kontinyu (lihat Gambar 1). Yang dimaksud perubahan kelembagaan pada level masyarakat adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat (*social embeddedness*) seperti norma, kebiasaan, tradisi, hukum adat, dll. Perubahan kelembagaan pada level ini berlangsung sangat lambat sehingga para ahli ekonomi kelembagaan tidak menganggapnya *variable analysis* yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Pada level ini, perubahan kelembagaan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, antara 100 sampai 1000 tahun.

Kedua, perubahan kelembagaan yang terjadi pada lingkungan kelembagaan formal. Menurut Williamson (2000), yang dimaksud kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja seperti perundang-undangan (*konstitusi*)

yang dibuat oleh lembaga legislatif/pemerintah. Namun demikian, hal ini bukan merupakan kriteria mutlak, karena banyak kasus kelembagaan formal yang merupakan hasil evolusi dari kelembagaan informal sebagaimana undang-undang perikanan di Jepang yang berasal dari hukum adat atau tradisi yang hidup dan menyatu dalam masyarakat selama ratusan tahun (Ruddle, 1993). Perubahan kelembagaan pada level ini dapat berlangsung dalam kurun waktu 10 sampai 100 tahun (Williamson, 2000).

Ketiga, perubahan kelembagaan yang terjadi pada level governance (tata kelola). Yaitu, serangkaian peraturan (rule of the game) dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola (governance structure), lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game tersebut. Williamson (2000) menganggap hal ini merupakan isu sentral ekonomi kelembagaan yang ia asumsikan bahwa penegakan governance tidak bebas biaya (costless). Demikian juga lahirnya sebuah struktur tata kelola yang baik yang menjamin kepastian interaksi dan transaksi antar aktor/pihak-pihak terkait (yaitu adanya resolusi konflik, kepastian sistem kontrak, dll) membutuhkan biaya. Governance akan selalu berubah menuju governance yang lebih efisien. Yaitu, governance yang dapat meminimumkan biaya transaksi. Perubahan kelembagaan pada level governance berlangsung relatif cepat, yaitu antara 1 sampai 10 tahun.

Bila perubahan kelembagaan pada level ketiga masih berlangsung secara diskontinu, perubahan

kelembagaan pada level (sepanjang waktu) mengharga alokasi sumberdaya lain, kelembagaan berul input produksi, vis ve menyebabkan perubaha ini dapat dipahami tap perubahan tersebut terha masih sulit dilakukan (W

Analisis perub Williamson ini agak su pada setiap level bersifa satu dan dua. Sehingga l begitu operasional. Mer Ostrom, penggiat kelem Bloomington, meng perubahaan kelembagaar level. Yaitu, operasio operasional choice level, pada level collective cho berada pada level cor lengkapnya ditampilkan

Operasional rule dalam keseharian. Yaitu sebuah komunitas, orga mengenai bagaimana in tersebut seharusnya terj sumberdaya alam, instrument pembatas me banyak dan bagaima

regislatif/pemerintah. Namun merupakan kriteria mutlak, kelembagaan formal yang lari kelembagaan informal perikanan di Jepang yang itu tradisi yang hidup dan itu selama ratusan tahun kelembagaan pada level ini itu run waktu 10 sampai 100

kelembagaan yang terjadi pada (lola). Yaitu, serangkaian dalam sebuah komunitas tata keleola (governance) tata cara penegakan, dan dari rule of the game menganggap hal ini ekonomi kelembagaan yang ia governance tidak bebas lahirnya sebuah struktur menjamin kepastian interaksi pihak-pihak terkait (yaitu sistem kontrak, dll) akan selalu berubah efisien. Yaitu, governance biaya transaksi. Perubahan berlangsung relatif ahun.

kelembagaan pada level ketiga diskontinu, perubahan

kelembagaan pada level keempat berlangsung kontinu (sepanjang waktu) mengikuti perubahan insetif ekonomi, harga alokasi sumberdaya dan tenaga kerja. Dengan kata lain, kelembagaan berubah mengikuti perubahan harga input produksi, vis versa, perubahan input produksi menyebabkan perubahan kelembagaan. Secara teoritis, hal ini dapat dipahami tapi bagaimana mengukur dampak perubahan tersebut terhadap realitas kehidupan ekonomi masih sulit dilakukan (Williamson, 2000).

Analisis perubahan kelembagaan model Williamson ini agak sulit dipahami. Karena perbedaan pada setiap level bersifat tidak jelas, kecuali pada level satu dan dua. Sehingga kerangka analisis tersebut kurang begitu operasional. Menyadari hal ini, Professor Elinor Ostrom, penggiat kelembagaan dari Indiana University, Bloomington, mengembangkan kerangka analisis perubahan kelembagaan yang membaginya dalam tiga level. Yaitu, operasional rule yang berada pada operasional choice level, collective choice rule yang berada pada level collective choice, dan constitutional rule yang berada pada level constitutional choice sebagaimana lengkapnya ditampilkan pada Gambar 2 (Ostrom, 1990).

Operasional rule adalah aturan main yang berlaku dalam keseharian. Yaitu aturan yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antar anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi. Terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam, operasional rule merupakan instrument pembatas mengenai kapan, dimana, seberapa banyak dan bagaimana anggota sebuah komunitas

memanfaatkan sumberdaya alam. Pengawasan (monitoring) terhadap tindakan setiap aktor, penegakan sanksi bagi para pelanggar dan pemberian reward kepada mereka yang taat aturan semuanya diatur dalam operasional rule. Operasional rule berubah seiring dengan perubahan teknologi, sumberdaya, budaya, keadaan ekonomi dll (Ostrom, 1990)

Walaupun operasional rule berubah secara spontan, namun dalam pelaksanaannya ada ketentuan-ketentuan atau kesepakatan-kesepakatan mengenai bagaimana operasional rule tersebut berubah. Ketentuan-ketentuan/kesepakatan-kesepakatan tersebut disebut collective choice rule. Yaitu, aturan mengenai bagaimana operasional rule dibuat atau diubah, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut harus berlangsung. Hasil pekerjaan aktor-aktor yang bermain pada level collective choice akan langsung berpengaruh pada operasional rule (Ostrom, 1990).

Kelembagaan pada constitutional choice level mengatur, utamanya, mengenai siapa yang berwenang bekerja pada level collective choice dan bagaimana mereka bekerja. Constitutional rule merupakan rule tertinggi yang tidak semua kelompok, organisasi atau komunitas memilikinya. Collective choice rule berbeda dengan constitutional rule walaupun aktor yang terlibat dalam pembuatannya kemungkinan sama. Sebagai contoh, perda mengenai pengelolaan sumberdaya air di sebuah kabupaten merupakan operasional rule. Perda ini dibuat oleh DPRD yang memiliki aturan main bagaimana perda tersebut dibuat. Aturan main ini disebut collective

choice rule. Selain itu mengatur tentang anggota terpilih menjadi anggota berhal menjadi anggota merupakan undang-undang tinggi dari sebuah Per Ostrom, undang-undang DPRD tersebut berada dan disebut constitutional

2.3. Teori Perubahan Ins

Telah dijelaskan lembaga/institusi bersi terjadi pada setiap level. permanen. Ia akan se kelembagaan (instituti efisien. Banyak teori perubahan kelembagaan Schlueter dan Hanisc perubahan kelembagaan berdasarkan efisiensi distribusi konflik (dist berdasarkan teori kebijai

Teori perubahan ekonomi memiliki tig pemikiran pertama di Hayek, ekonom terke utama ekonomi neo kl kelembagaan bersifat : merupakan hasil dari 1968). Artinya bahw

laya alam. Pengawasan akan setiap aktor, penegakan dan pemberian reward kepada n semuanya diatur dalam al rule berubah seiring dengan nberdaya, budaya, keadaan

l rule berubah secara spontan, nya ada ketentuan-ketentuan atan mengenai bagaimana out berubah. Ketentuan-pakatan tersebut disebut , aturan mengenai bagaimana atau diubah, siapa yang i kapan perubahan tersebut pekerjaan aktor-aktor yang tive choice akan langsung l rule (Ostrom, 1990).

constitutional choice level enai siapa yang berwenang ive choice dan bagaimana onal rule merupakan rule i kelompok, oragnisasi atau llective choice rule berbeda valaupun aktor yang terlibat nungkinan sama. Sebagai igelolaan sumberdaya air di n operasional rule. Perda ini iliki aturan main bagaimana n main ini disebut collective

choice rule. Selain itu ada juga aturan main yang mengatur tentang anggota DPRD, mengapa seseorang terpilih menjadi anggota DPRD, sampai kapan mereka berhal menjadi anggota DPRD dll. Aturan main ini bisa merupakan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari sebuah Perda. Menurut kerangka analisis Ostrom, undang-undang yang mengatur tentang anggota DPRD tersebut berada pada level constitutional choice dan disebut constitutional rule.

2.3. Teori Perubahan Institusi

Telah dijelaskan di subbab sebelumnya bahwa lembaga/institusi bersifat berubah. Perubahan dapat terjadi pada setiap level. Tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Ia akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan (institutional arrangement) yang lebih efisien. Banyak teori yang menjelaskan mengenai perubahan kelembagaan. Dari sejumlah teori yang ada, Schlueter dan Hanisch (1999) mengklasifikasi teori perubahan kelembagaan dalam tiga kelompok, yaitu: berdasarkan efisiensi ekonomi; berdasarkan teori distribusi konflik (distributional conflict theory); dan berdasarkan teori kebijakan publik.

Teori perubahan kelembagaan berbasiskan efisiensi ekonomi memiliki tiga arus pemikiran utama. Arus pemikiran pertama disampaikan oleh Prof. Friedrich Hayek, ekonom terkemuka Austria dan pendukung utama ekonomi neo klasik. Menurut Hayek, perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak disengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja (Hayek, 1968). Artinya bahwa seseorang atau sekelompok

masyarakat tidak akan membuat sebuah lembaga/aturan bila tidak ada dorongan yang menuntut aturan tersebut harus ada. Yang dimaksud Hayek, "perubahan kelembagaan bersifat spontan" adalah bahwa lahirnya dorongan untuk menciptakan atau merubah kelembagaan bersifat spontan (unintentionally). Sedangkan aktifitas membuat atau mewujudkan kelembagaannya bersifat disengaja (intentional). Sebagai contoh, pembuatan perda tentang pengelolaan sumberdaya air tanah merupakan tindakan yang disengaja, tapi lahirnya kebutuhan adanya perda tersebut bersifat spontan sebagai respons terhadap situasi yang berkembang.

Cabang kedua tentang teori perubahan kelembagaan mengatakan bahwa sebuah lembaga/aturan berubah karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan (property rights). Artinya, seseorang atau anggota masyarakat terdorong membuat sebuah aturan tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak kepemilikan dari gangguan yang datang dari luar. Adanya land tenure system (sistem kepemilikan lahan) dalam masyarakat adat bertujuan agar hak-hak lahan terdistribusi di antara anggota masyarakat adat tersebut dan mereka memiliki kepastian mengenai hal tersebut. Pemikiran ini disampaikan antara lain oleh Posner (1992).

Pemikiran ketiga perubahan ekonomi kelembagaan berdasarkan atas efisiensi ekonomi antara lain disampaikan oleh Oliver Williamson, Professor Ekonomi dan Hukum. Menurutnya, lembaga/aturan akan terus berubah/bergerak dinamis sebagai upaya

meminimumkan biaya (Williamson, 2000). penegakan hukum, mempengaruhi inser berinteraksi dengan pi pada perubahan keler harga relatif faktor pro terlibat dalam transa mencapai kesepakatan kesepakatan atau kor perubahan aturan 1 menegaskan, perub perubahan aturan mai

Selain itu, k terhadap perubahan masyarakat/aktor-akt komunitas. Perubaha North (1990), akan n yang ada. Jika para a yang berlaku suda perkembangan atau k ia akan berusaha m agar lebih akomodat Kehilangan nilai bud komunitas merupaka karena adanya peri

² Biaya transaksi m Economics. Yaitu, semua bi membuat aturan, menegakar sistem ekonomi sebuah peru ini pertama kali disampaikan secara mendalam pada bab k

uat sebuah lembaga/aturan yang menuntut aturan tersebut sesuai dengan sudut pandang Hayek, "perubahan institusional" adalah bahwa lahirnya atau merubah kelembagaannya (North, 1990). Sedangkan aktifitas kelembagaannya bersifat endogen. Sebagai contoh, pembuatan peraturan mengenai layanan air tanah merupakan lahirnya kebutuhan adanya kelembagaan sebagai respons terhadap

teori perubahan kelembagaan bahwa sebuah lembaga/aturan yang melindungi hak-hak individu. Artinya, seseorang atau kelompok yang membuat sebuah aturan untuk melindungi hak-hak individu yang datang dari luar sistem kepemilikan lahan individu agar hak-hak lahan individu masyarakat adat tersebut tidak mengancam hal tersebut. Menurut Posner (1992).

Perubahan ekonomi kelembagaan kelembagaan ekonomi antara lain Williamson, Professor Ekonomi kelembagaan/aturan akan terus berlanjut sebagai upaya

meminimumkan biaya transaksi (transaction cost)² (Williamson, 2000). Perubahan biaya informasi, penegakan hukum, perubahan harga, teknologi dll mempengaruhi insentif/motivasi seseorang dalam berinteraksi dengan pihak lain. Hal ini akan berpengaruh pada perubahan kelembagaan (North, 1990). Perubahan harga relatif faktor produksi akan mendorong pihak yang terlibat dalam transaksi melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan baru. Perubahan kesepakatan atau kontraktual akan sangat sulit tanpa perubahan aturan main. Oleh karena itu, North menegaskan, perubahan harga membawa pada perubahan aturan main.

Selain itu, kelembagaan juga tidak resisten terhadap perubahan selera atau kesukaan anggota masyarakat/aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah komunitas. Perubahan tersebut, sebagaimana diyakini North (1990), akan mengancam eksistensi kelembagaan yang ada. Jika para aktor merasakan bahwa kelembagaan yang berlaku sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan atau kondisi lingkungan yang ada, maka mereka akan berusaha melakukan perubahan kelembagaan agar lebih akomodatif terhadap lingkungan yang baru. Kehilangan nilai budaya, norma, tradisi dll dari sebuah komunitas merupakan contoh perubahan kelembagaan karena adanya perubahan kondisi lingkungan, baik

² Biaya transaksi merupakan topik penting dalam new Institutional Economics. Yaitu, semua biaya yang dikeluarkan untuk mencari informasi, membuat aturan, menegakan sistem hukum, menegakan sanksi dll sehingga sistem ekonomi sebuah perusahaan atau negara berjalan secara efisien. Istilah ini pertama kali disampaikan oleh Ronald Coas. Topik ini akan dibahas secara mendalam pada bab khusus biaya transaksi.

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

karena pengaruh eksternal sosial ekonomi komunitas tersebut maupun karena faktor internal. Sebagai contoh, permintaan pasar ikan karang yang tinggi dengan harga yang sangat bagus merupakan insentif bagi nelayan untuk menangkap ikan sebanyak mungkin. Karena itu, larangan menangkap ikan karang sebagaimana berlaku di beberapa kawasan konservasi laut dianggap oleh para nelayan sebagai faktor penghambat mencari keuntungan ekonomi. Sehingga, nelayan akan berusaha mengubah, mencabut atau mengabaikan larangan tersebut. Pencabutan atau perubahan sebagian dari aturan tersebut merupakan bentuk perubahan kelembagaan.

Demikian juga, ketika undang-undang no. 24/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi terkini sehingga tidak efektif, maka pemerintah mengupayakan perubahan atas undang-undang tersebut yang drafnya kini sedang dibahas. Pada saat undang-undang tentang tata ruang dirasa sudah tidak sesuai lagi maka pemerintah akan berupaya menggantinya dengan undang-undang baru yang bisa lebih baik. Perubahan kelembagaan akan terus berlangsung untuk meminimumkan biaya transaksi.

Teori kedua yang menjelaskan perubahan kelembagaan adalah *distributional conflict theory*. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor dalam sebuah arena (komunitas) memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik. Setiap aktor yang terlibat konflik akan berusaha mencari solusi atas konflik tersebut dengan memanfaatkan kekuatan (*power*) yang ia miliki dengan

jalan mengubah aturan dapat mengendalikan p baik, misalnya karena modal, dll, akan me tersebut agar berpihak (1992). Perubahan kele memuaskan semua kepentingan kolektif mereka yang punya kel bisa disengaja atau bis stratrgi mencari keur bermain. Oleh karena menarik dalam proses p adanya perbedaan kep bermain. Mereka tidak tersebut akan lebih ef bagaimana agar aturan menguntungkan kelomp

Mengenai *power*, sebagai kekuatan untuk bertindak sesuai dengan *powerful* dari pada memaksa "B" menga utamanya berasal dari ' hal ini, pada awalnya " "B" meskipun pada tersebut juga menguntungkan kelompok B atas kelemt setuju dengan isiny melainkan karena mere lebih menguntungkan

sosial ekonomi komunitas
 or internal. Sebagai contoh,
 g yang tinggi dengan harga
 i insentif bagi nelayan untuk
 mungkin. Karena itu, larangan
 aimana berlaku di beberapa
 anggap oleh para nelayan
 encari keuntungan ekonomi.
 aha mengubah, mencabut
 tersebut. Pencabutan atau
 uran tersebut merupakan
 n.

undang-undang no. 24/1997
 an dianggap sudah tidak
 kini sehingga tidak efektif,
 ayakan perubahan atas
 ng drafnya kini sedang
 dang tentang tata ruang
 i maka pemerintah akan
 an undang-undang baru
 n kelembagaan akan terus
 kan biaya transaksi.

menjelaskan perubahan
 al conflict theory. Teori ini
 setiap aktor dalam sebuah
 rbedaan kepentingan dan
 an ini merupakan sumber
 at konflik akan berusaha
 flik tersebut dengan
) yang ia miliki dengan

jalan mengubah aturan main yang berlaku. Aktor yang dapat mengendalikan power atau memiliki power lebih baik, misalnya karena menguasai informasi, akses politik, modal, dll, akan mengendalikan proses perubahan tersebut agar berpihak pada kepentingannya (Knight, 1992). Perubahan kelembagaan tersebut bukan untuk memuaskan semua pihak atau untuk mencapai kepentingan kolektif melainkan untuk kepentingan mereka yang punya kekuatan. Proses perubahan tersebut bisa disengaja atau bisa pula sebagai konsekuensi dari strategi mencari keuntungan dari aktor-aktor yang bermain. Oleh karena itu, sering ditemukannya tarik menarik dalam proses pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Mereka tidak peduli apakah kelembagaan baru tersebut akan lebih efisien atau tidak. Yang penting, bagaimana agar aturan main yang baru tersebut dapat menguntungkan kelompoknya (Knight, 1992).

Mengenai power, Knight (1992) mendefinisikannya sebagai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan kepentingannya. Jika "A" lebih powerful dari pada "B", maka "A" akan mampu memaksa "B" mengadopsi aturan main yang ide utamanya berasal dari "A" atau dibuat oleh "A". Dalam hal ini, pada awalnya "A" tidak memikirkan kepentingan "B" meskipun pada akhirnya bisa jadi aturan baru tersebut juga menguntungkan "B". Dalam hal ini, ketaatan kelompok B atas kelembagaan baru bukan karena mereka setuju dengan isinya, atau menguntungkannya, melainkan karena mereka tidak mampu membuat yang lebih menguntungkan baginya. Kondisi ini, menurut

Knights, akan terus berlangsung selama power resources tidak terdistribusi secara merata atau asymmetric power condition.

2.2. Ekonomi Kelembagaan

2.2.1. Awal Kemunculan Ekonomi Kelembagaan (Old Institutional Economics)

Kemunculan wacana ekonomi kelembagaan diawali dengan kritik pedas Thorsten Veblen³ atas dasar teori dan implementasi ekonomi klasik dan neoklasik. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, mainstream ekonomi (neoklasik dan klasik) sejak digagas pertama kali oleh Adam Smith menempatkan manusia sebagai makhluk super rasional. Konsekuensi dari pemikiran ini, manusia dianggap sangat rasional dalam menentukan pilihan-pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Teori utilitas yang memandang nilai benda dari segi manfaatnya semata lahir dari pandangan manusia sebagai makhluk rasional.

Veblen menentang pendapat ini. Menurutnya, manusia tidak hanya memiliki rasio tapi juga memiliki perasaan, kecenderungan, instink, dan kebiasaan yang terikat dengan budayanya. Pilihan-pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak semestinya hanya didasarkan atas pertimbangan rasional seraya mengabaikan dimensi lain dari manusia. Memandang manusia hanya sebagai makhluk rasional terlalu

³ Thorsten Veblen merupakan seorang sosiolog yang mendalami ekonomi. Keritikannya yang tajam dan mendalam terhadap pemikiran ekonomi klasik telah melahirkan pemikiran Ekonomi Kelembagaan. Atas jasa-jasanya tersebut, murid-muridnya menganggap Veblen sebagai bapak ekonomi kelembagaan.

menyederhanakan pe melakukan kegiatan tidak memiliki instink/dorongan (workmanship instink). yang tidak dimotivasi ekonomi seperti para pejuang lingkungan, pembangunan sarana ibe

Veblen tidak mer dan kepuasan material pertimbangan-pertimbangan. Menurutnya, manusia hanya memiliki rasio tapi dan kecenderungan/natural (workmanship) merpak melakukan sesuatu k ekonomi yang bisa dia Tentu saja, pandangan utilitarianisme yang dia neoklasik. Utilitarianisme menghalalkan segala cara material melalui pendek

Menurut pikiran mengenai manusia behaviorisme, manusia multidimensi. Ia tidak benda mati yang cendek kaitannya dengan memilih benda A bukan faktor Bnya dihilangkan

tersebut selama power resources
tidak merata atau asymmetric power

Ekonomi Kelembagaan (Old

Ekonomi kelembagaan
Thorsten Veblen³ atas dasar
ekonomi klasik dan neoklasik.
Ekonomi ini, mainstream ekonomi
digagas pertama kali oleh
manusia sebagai makhluk
dari pemikiran ini, manusia
alam menentukan pilihan-
kebutuhan hidupnya. Teori
nilai benda dari segi
pandangan manusia sebagai

menyadap ini. Menurutnya,
keinginan rasio tapi juga memiliki
instink, dan kebiasaan yang
a. Pilihan-pilihan dalam
tidak semestinya hanya
pandangan rasional seraya
dari manusia. Memandang
makhluk rasional terlalu

orang sosiolog yang mendalami
mendalam terhadap pemikiran
Ekonomi Kelembagaan. Atas
menganggap Veblen sebagai bapak

menyederhanakan persoalan manusia. Manusia
melakukan kegiatan tidak hanya karena motif ekonomi. Ia
memiliki instink/dorongan untuk melakukan kerja
(workmanship instink). Banyak contoh kegiatan manusia
yang tidak dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan
ekonomi seperti para pencinta alam, kaum relawan,
pejuang lingkungan, memberi sumbangan untuk
pembangunan sarana ibadah dll.

Veblen tidak menerima jika rasa senang, bahagia,
dan kepuasan material hanya merupakan buah dari
pertimbangan-pertimbangan rasional semata.
Menurutnya, manusia adalah makhluk kompleks, tidak
hanya memiliki rasio tapi juga perasaan, selera, kebiasaan
dan kecenderungan/naluri. Naluri bekerja (instinct of
workmanship) merupakan dorongan manusia untuk
melakukan sesuatu kendatipun tidak ada manfaat
ekonomi yang bisa diambil dari tindakannya tersebut.
Tentu saja, pandangan ini sangat kontras dengan paham
utilitarianisme yang dianut oleh para ekonom klasik dan
neoklasik. Utilitarianisme adalah suatu paham yang
menghalalkan segala cara untuk mencapai kebahagiaan
material melalui pendekatan-pendekatan rasional.

Menurut pikiran Veblen, yang pandangannya
mengenai manusia dipengaruhi oleh paham
behaviorisme, manusia merupakan makhluk
multidimensi. Ia tidak bisa diperlakukan sebagai layaknya
benda mati yang cenderung statik deterministik. Artinya,
kaitannya dengan menentukan pilihan-pilihan, ketika ia
memilih benda A bukan hanya karena B sehingga jika
faktor Bnya dihilangkan ia tidak akan memilih A. Tapi,

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

ketika ia menjatuhkan pilihan pada A, ada faktor B, C, D, E dst yang ia pertimbangkan.

Veblen juga berpandangan bahwa lingkungan fisik dan material dimana manusia berada sangat mempengaruhi kecenderungan manusia dan pandangannya mengenai dunia dan kehidupannya. Orang yang hidup dalam lingkungan yang konsusif untuk bekerja maka ia akan cenderung memiliki etos kerja baik. Hubungan manusia dengan lingkungan akan mempengaruhi pola interaksi antar manusia dengan kekayaannya (property), sistem politik/hukum, falsafah hidup dan agama/keyakinannya. Interaksi manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya tersebut mendorong lahirnya kelembagaan sebagai penopang tegaknya interaksi yang harmonis, dinamis, dan pasti. Veblen mendefinisikan kelembagaan sebagai "cara melakukan sesuatu, berfikir tentang sesuatu, mendistribusikan sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas kerja".

Veblen membagi kelembagaan menjadi dua: kelembagaan teknologi dan kelembagaan seremonial. Kelembagaan teknologi meliputi mesin pengolah (machine process), penemuan, metoda produksi, teknologi dll. Kelembagaan seremonial meliputi serangkaian hak-hak kepemilikan (set of property rights), struktur sosial dan ekonomi, kelembagaan keuangan, dll. Perubahan kelembagaan teknologi akan mendorong perubahan kelembagaan seremonial.

Lebih spesifik Veblen menyebutkan bahwa teknologi merupakan bagian dari kelembagaan. Tegasnya,

teknologi sangat berpeperubahan sistem sosial masyarakat yang har pertanian maka ia akar dari sudut pandang tek Pada saat teknologi terhadap dunia pertanian

Pandangan Veblen dengan pandangan Ka karena sama-sama berbiologi Charles Darwin keduanya dalam soal Marx berpandangan berakhir manakala ma yang disebut dengan m Sedangkan, Veblen ber akan terus berlanjut perubahan teknologi. A diprediksi (unpredictable) evolusi sangat p evolusi/perubahan sos daripada evolusi bi mengalami stagnasi se Sedangkan budaya mar perubahan teknologi da

Veblen memand ruh ekonomi kla bertanggungjawab atas telah menjadikan ilmu kekayaan semata. Men

pada A, ada faktor B, C, D,

gan bahwa lingkungan fisik manusia berada sangat dengan manusia dan dunia dan kehidupannya. lingkungan yang konsumtif untuk ng memiliki etos kerja baik. gan lingkungan akan si antar manusia dengan m politik/hukum, falsafah ya. Interaksi manusia yang gan sekitarnya tersebut agaan sebagai penopang onis, dinamis, dan pasti. mbagaan sebagai "cara ikir tentang sesuatu, g dihasilkan dari aktivitas

mbagaan menjadi dua: kelembagaan seremonial. meliputi mesin pengolahan, metoda produksi, n seremonial meliputi an (set of property rights), lembaga keuangan, dll. ologi akan mendorong nial.

i menyebutkan bahwa ri kelembagaan. Tegasnya,

teknologi sangat berpengaruh pada cara pandang dan perubahan sistem sosial dan ekonomi. Sebagai misal, masyarakat yang hanya tahu cangkul sebagai alat pertanian maka ia akan melihat pembangunan pertanian dari sudut pandang teknologi cangkul yang dikuasainya. Pada saat teknologi berubah, maka pandangannya terhadap dunia pertanian akan berubah pula.

Pandangan Veblen soal perubahan sosial mirip dengan pandangan Karl Marx. Hal ini bisa dimaklumi karena sama-sama bermuara pada satu teori evolusi biologi Charles Darwin. Darwin merupakan mentor keduanya dalam soal teori perubahan sosial. Namun, Marx berpandangan bahwa perubahan sosial akan berakhir manakala masyarakat adil makmur sejahtera yang disebut dengan masyarakat komunis telah terwujud. Sedangkan, Veblen berpendapat bahwa perubahan sosial akan terus berlanjut secara dinamis sejalan dengan perubahan teknologi. Akhir dari perubahan tersebut sulit diprediksi (unpredictable). Bagi Veblen, pemahaman teori evolusi sangat penting dalam menjelaskan evolusi/perubahan sosial, sistem ekonomi dan budaya daripada evolusi biologi yang menurutnya telah mengalami stagnasi sejak beberapa ribu tahun silam. Sedangkan budaya manusia terus berubah seiring dengan perubahan teknologi dan kelembagaan.

Veblen memandang utilitarisisme yang menjadi ruh ekonomi klasik dan neoklasik harus bertanggungjawab atas lahirnya paham hedonisme yang telah menjadikan ilmu ekonomi sebagai ilmu mencari kekayaan semata. Menurut Veblen, ilmu ekonomi klasik

dan neoklasik telah telah mengabaikan peran sentral kelembagaan dalam mendistribusikan kekayaan. Bahkan, menurutnya, invisible handnya Adam Smith yang mengarahkan seseorang yang mementingkan dirinya sendiri untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain tidak lain hanyalah bujukan yang menjustifikasi sifat individualistis yang serakah.

Ilmu ekonomi yang menurutnya menjadi disiplin ilmu yang deterministik, hitam putih, predictable, jika A maka B. Padahal, menurutnya, asumsi yang dibuat oleh para pemikir klasik dan neoklasik yang telah menyesatkan ilmu ekonomi menjadi ilmu yang deterministik adalah tidak valid, sembarangan dan terlalu menyederhanakan persoalan. Memandang manusia sebagai makhluk yang selalu merasionalkan pilihan-pilihannya dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah sangat naif. Karena itu, tegasnya, ilmu ekonomi klasik dan neoklasik tidak bermanfaat.

Ilmu ekonomi menjadi ilmu yang mengajarkan cara hidup hedonis dan konsumtif. Fakta menunjukkan bahwa naluri keserakahan dan kecintaan mengumpulkan harta berlebihan telah menjangkiti masyarakat amerika pada akhir abad 19. Masyarakat amerika telah menjadi masyarakat yang hedonis dan konsumtif, baik dari sisi suplai maupun demand. Padahal sejarah mencatat, bahwa perilaku manusia, termasuk dalam menentukan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak deterministik mekanistik. Perubahan satu hal tidak serta merta menyebabkan perubahan hal lain. Karena, kelembagaan, teknologi, budaya, dan tatanan masyarakat

selalu berubah. Karena faktor berpengaruh su kelembagaan dalam ma waktu. Adanya asumsi elastisitas harga, men yang mempengaruhi pe atas suatu komoditas y secara bersama-sama.

Teknologi bersifat terdorong oleh naluri ingin tahu. Teknologi dalam masyarakat ya kelembagaan seremonial seremonial bersifat rela hanya sebagai respon a kelembagaan sosial da sangat tergantung pad yang ada pada saat itu. masyarakat feodal er berbeda dengan kele masyarakat modern a masih merupakan pec tidak perlu memiliki su tidak ada aturan har sebelah kiri. Tapi d transportasi yang demi mungkin tidak ada kehadiran internet di baru serta tuntutan unti

mengabaikan peran sentral ribusikan kekayaan. Bahkan, idnya Adam Smith yang ng mementingkan dirinya n kesejahteraan orang lain i yang menjustifikasi sifat

enurutnya menjadi disiplin m putih, predictable, jika A a, asumsi yang dibuat oleh neoklasik yang telah ni menjadi ilmu yang d, sembarangan dan terlalu l. Memandang manusia u merasionalkan pilihan- kebutuhan hidup adalah a, ilmu ekonomi klasik dan

mu yang mengajarkan cara Fakta menunjukkan bahwa aan mengumpulkan harta nasyarakat amerika pada amerika telah menjadi konsumtif, baik dari sisi l sejarah mencatat, bahwa am menentukan pilihan- utuhan hidupnya, tidak ahan satu hal tidak serta an hal lain. Karena, dan tatanan masyarakat

selalu berubah. Karena itu, pengaruh hilangnya satu faktor berpengaruh sulit diprediksi karena perubahan kelembagaan dalam masyarakat selalu terjadi sepanjang waktu. Adanya asumsi ceterus paribus, misalkan dalam elastisitas harga, mencerminkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran manusia atas suatu komoditas yang tidak dapat diperhitungkan secara bersama-sama.

Teknologi bersifat dinamis, terus berubah karena terdorong oleh naluri manusia untuk bekerja dan rasa ingin tahu. Teknologi merupakan kekuatan dinamik dalam masyarakat yang mempengaruhi karakteristik kelembagaan seremonial. Dengan kata lain, kelembagaan seremonial bersifat relatif statis dalam arti perubahannya hanya sebagai respon atas perubahan teknologi. Struktur kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat primitif sangat tergantung pada status perkembangan teknologi yang ada pada saat itu. Kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat feodal eropa (abad pertengahan) sangat berbeda dengan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat modern abad 20. Ketika alat transportasi masih merupakan pedati kemungkinan pengemudinya tidak perlu memiliki surat izin mengemudi. Mungkin juga tidak ada aturan harus berjalan sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi dengan perkembangan teknologi transportasi yang demikian canggih adalah sangat tidak mungkin tidak ada aturan demikian. Contoh lain, kehadiran internet di abad 21 telah melahirkan budaya baru serta tuntutan untuk mengaturnya.

Pemikiran Veblen menempatkan paradigma ekonomi kelembagaan pada posisi bersebrangan dengan ekonomi klasik/neo klasik. Pemikiran apapun yang berasal dari aliran ekonomi arus utama ini dianggap salah, karena Veblen menganggap salah semua asumsi dasar yang menjadi pondasi aliran ekonomi klasik/neo klasik. Anggapan bahwa manusia sebagai makhluk rasional yang selalu mempertimbangkan untung rugi secara ekonomi dalam setiap transaksi, kebebasan individu, dan konsep kepemilikan pribadi merupakan bagian dari asumsi ekonomi klasik/neoklasik yang oleh Veblen dianggap keliru. Pemikiran ekonomi kelembagaan ini kemudian dikenal dengan sebutan Old Institutional Economic atau American Tradition of institutional economics. Mazhab ekonomi kelembagaan ini sering dikritik karena lemahnya metodologi dan struktur pemikiran.

2.2.2. New Institutional Economics (NIE)

Berbeda dari American *institutionalist school* yang berpandangan bahwa sejarah dan kelembagaan sosial menentukan struktur ekonomi dimana hal ini bersebrangan dengan neoclassical economics theory (market based economics), new institutionalist merupakan sekumpulan pemikiran yang mencoba menerangkan, politik, sejarah, ekonomi dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perusahaan (firm) konvensi sosial, keluarga dll dalam bingkai *neoclassical economic theory*. Teori ini merupakan buah perenungan Chicago School yang terus berupaya agar teori ekonomi klasik bisa menerangkan wilayah masyarakat manusia (area of

human society) dengan selama ini diabaikan masyarakat atau negara. Ini, Ronald Coase, Armen Oliver Williamson, men: "New Institutional" atau (NIE)" untuk membec Institutional school seba berkembang pesat dan mu ekonomi alternatif setela konsep biaya transaksi (biaya transaksi mempengaruhi pilihan ekonomi yang Temuan ini telah mengh nobel bidang ekonomi perkembangan NIE juga paradigma property right berargumen bahwa efisiensi ditentukan oleh faktor sebagai sebuah lembaga menurutnya, institusi pa sumberdaya yang terbatas property rights.

2.3. Biaya Transaksi

2.3.1. Definisi Transaksi

Transaksi adalah tr satu tahap ke tahap lain i Satu tahapan selesai d (Williamson, 1985). Sed Furubotn (2000), trans

menempatkan paradigma posisi bersebrangan dengan . Pemikiran apapun yang arus utama ini dianggap nggap salah semua asumsi aliran ekonomi klasik/neo manusia sebagai makhluk ertimbangkan untung rugi tiap transaksi, kebebasan nilikan pribadi merupakan klasi/neoklasik yang oleh kiran ekonomi kelembagaan 1 sebutan Old Institutional Tradition of institutional i kelembagaan ini sering metodologi dan struktur

ics (NIE)

institutionalist school yang dan kelembagaan sosial omi dimana hal ini assical economics theory institutionalist merupakan mencoba menerangkan, kelembagaan sosial seperti perusahaan (firm) konvensi agkai *neoclassical economic* uah perenungan Chicago r teori ekonomi klasik bisa rakat manusia (area of

human society) dengan segala karakteristiknya yang selama ini diabaikan dalam membangun ekonomi masyarakat atau negara. Mereka yang bekerja di bidang ini, Ronald Coase, Armen Alchian, Harold Demsetz dan Oliver Williamson, menyebut pandangan ini sebagai "New Institutionalism" atau New Institutional Economics (NIE)" untuk membedakannya dengan American Institutional school sebagaimana dijelaskan di atas. NIE berkembang pesat dan mulai diperhitungkan sebagai teori ekonomi alternatif setelah Ronald Coase menemukan konsep biaya transaksi (transaction cost). Menurutnya, biaya transaksi mempengaruhi kelembagaan dan pilihan-pilihan ekonomi yang orang lakukan (Coase, 1988). Temuan ini telah menghantarkan Coase meraih hadiah nobel bidang ekonomi pada tahun 1991. Selain itu, perkembangan NIE juga diperkuat dengan lahirnya paradigma property rights oleh Harold Demsetz yang berargumen bahwa efisiensi alokasi sumberdaya sangat ditentukan oleh faktor kepemilikan (property rights) sebagai sebuah lembaga (institusi). Dengan kata lain, menurutnya, institusi pasar dapat bekerja mengalokasikan sumberdaya yang terbatas dengan baik bila ada alokasi property rights.

2.3. Biaya Transaksi

2.3.1. Definisi Transaksi

Transaksi adalah transfer/perpindahan barang dari satu tahap ke tahap lain melalui teknologi yang terpisah. Satu tahapan selesai dan tahap berikutnya dimulai (Williamson, 1985). Sedangkan menurut Richter dan Furubotn (2000), transaksi merupakan perpindahan

barang, jasa, informasi, pengetahuan dan lain-lain dari satu tempat (komunitas) ke tempat (komunitas) lain atau pemindahan barang dari produsen ke konsumen, atau pemindahan barang dari satu individu ke individu yang lain. Hal ini disebut transaksi fisik/delivery.

Selain dalam pengertian perpindahan fisik, transaksi juga meliputi akuisis atau pemindahan hak kepemilikan atas barang dari pemilik ke pihak lain dimana hal ini disebut transaksi dari aspek legal.

Definisi transaksi yang lebih luas disampaikan Max Weber. Menurutnya, transaksi adalah tindakan yang diperlukan untuk menetapkan, memelihara dan atau mengubah hubungan sosial (Weber, 1968). Definisi ini meliputi pembentukan dan upaya mempertahankan kerangka kelembagaan dimana proses transaksi ekonomi bisa terjadi.

2.3.2. Pengertian Biaya Transaksi

Oliver Williamson mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya untuk menjalankan sistem ekonomi (Williamson, 1985). Sedangkan Dorfman (1981) mengartikannya sebagai biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Douglas North menyebutnya sebagai biaya untuk menspesifikasi dan memaksakan kontrak yang mendasari pertukaran, sehingga dengan sendirinya mencakup biaya organisasi politik dan ekonomi. Dengan demikian, meliputi biaya negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran (North, 1991). Menurut Mburu (2002), biaya pencarian informasi, biaya negosiasi, dan biaya pengawasan,

pemaksaan (enforcement) dan (Mburu, 2002)

2.3.3. Klasifikasi Biaya Transaksi

Richter dan Furuborn (1987) mengklasifikasi transaksi menjadi tiga jenis berdasarkan biaya transaksinya, yaitu:

1. Market transaction cost:

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk bisa sampai ke pasar. Biaya pencarian/pengadaan informasi, biaya kontrak (biaya bargaining, biaya keputusan); biaya monitoring (biaya supervisi dan penegakan hukum).

Biaya informasi (biaya pencarian informasi): biaya iklan, biaya mengikuti pameran, pasar (post, telepon, dll), harga barang yang ditawarkan oleh beberapa supplier, biaya mencari pegawai yang berkualifikasi.

Bargaining and decision making cost: dikeluarkan agar informasi yang diperoleh bermanfaat, biaya konsultasi.

Supervision and enforcement cost: dikeluarkan untuk mengawasi agar sampai tepat waktu, mengontrol produk yang ditransaksikan agar berjalan sesuai kesepakatan.

2. Managerial Transaction Cost

getahuan dan lain-lain dari tempat (komunitas) lain atau produsen ke konsumen, atau individu ke individu yang fisik/delivery.

ertian perpindahan fisik, fisik atau pemindahan hak dari pemilik ke pihak lain dari aspek legal.

lebih luas disampaikan Max adalah tindakan yang an, memelihara dan atau (Weber, 1968). Definisi ini upaya mempertahankan a proses transaksi ekonomi

ksi

difinisikan biaya transaksi alankan sistem ekonomi igkan Dorfman (1981) ya untuk menyesuaikan ungan. Douglas North untuk menspesifikasi dan mendasari pertukaran, mencakup biaya organisasi demikian, meliputi biaya memaksakan pertukaran 1 (2002), biaya pencarian dan biaya pengawasan,

pemaksaan (enforcement) dan biaya pelaksanaan (Mburu, 2002)

2.3.3. Klasifikasi Biaya Transaksi

Richter dan Furubotn (2000) membagi biaya transaksi menjadi tiga jenis, sesuai dengan jenis transaksinya, yaitu:

1. Market transaction cost:

Seluruh biaya yang dikeluarkan agar barang/jasa bisa sampai ke pasar. Biaya persiapan kontrak (biaya pencarian/pengadaan informasi); biaya pembuatan kontrak (biaya bargaining/negosiasi dan pembuatan keputusan); biaya monitoring dan penegakan kontrak (biaya supervisi dan penegakan kesepakatan)

Biaya informasi (mencari atau menyediakan informasi): biaya iklan, mendatangi calon customer, mengikuti pameran, pasar mingguan, biaya komunikasi (post, telepon, dll), harga barang yang sama yang diminta oleh beberapa supplier, biaya pengujian kualitas, biaya mencari pegawai yang berkualitas

Bargaining and decision cost meliputi: biaya yang dikeluarkan agar informasi yang dikumpulkan bermanfaat, biaya konsultan, dll.

Supervision and enforcement cost: biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi pengiriman barang agar sampai tepat waktu, mengukur kualitas dan jumlah produk yang ditransaksikan, biaya penegakan kontrak agar berjalan sesuai kesepakatan,

2. Managerial Transaction cost

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

Biaya terkait dengan upaya menciptakan keteraturan, contoh:

1. biaya membuat, mempertahankan atau mengubah rancangan/struktur organisasi, meliputi biaya personal management, IT, mempertahankan kemungkinan pengambilalihan pihak lain, public relation, dan lobby
2. Biaya menjalankan organisasi, meliputi: biaya informasi (biaya pembuatan keputusan, pengawasan pelaksanaan perintah sesuai keputusan, mengukur kinerja pegawai, biaya agen, manajemen informasi. Termasuk juga biaya pemindahan barang intra perusahaan

3. Political Transaction cost

Biaya terkait pembuatan tata aturan/kelembagaan (public goods) sehingga transaksi pasar dan manajerial bisa berlangsung dengan baik.

1. Biaya pembuatan (setting up), pemeliharaan, pengubahan organisasi politik formal dan informal, seperti biaya penetapan kerangka hukum, struktur administrasi pemerintahan, militer, sistem pendidikan, pengadilan dll.
2. Biaya menjalankan bentuk pemerintahan, peraturan pemerintah atau masyarakat yang bertata negara, seperti biaya legislasi, pertahanan, administrasi hukum, pendidikan, termasuk didalamnya semua biaya pencarian/pengumpulan dan pengolahan informasi yang diperlukan agar tata pemerintahan dapat berjalan. Biaya upaya

pelibatan ma
termasuk ke da

2.3.4. Karakteristik Biaya Transaksi

Perusahaan, b
sebagai sebuah gove
terjadi transaksi/in
Transaksi dengan j
dipengaruhi oleh ling
tingkatannya lebih t
kelembagaan eksterna
antar indivu/bagian
suatu governance ju
yang cenderung oppc

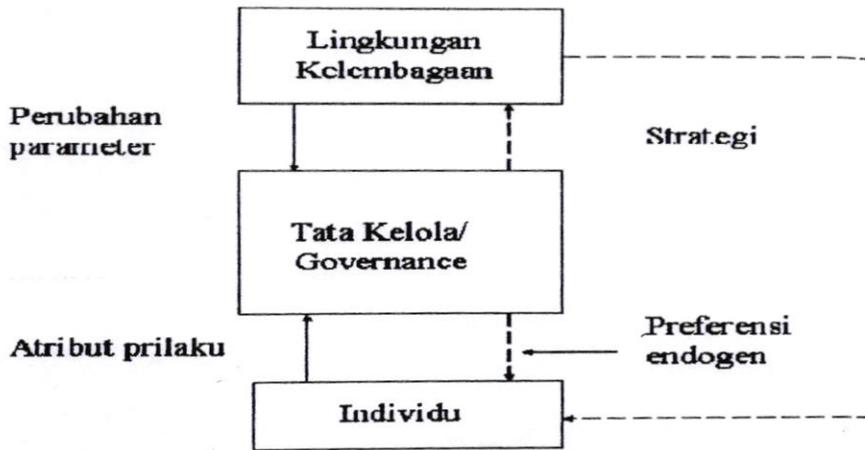
Contoh: Pemc
Transaksi yang terja
internal dan lingkun
merupakan sebuah
mengikuti kelembag
oleh lingkungan kele
transaksi biayanya se

pelibatan masyarakat dalam proses politik termasuk ke dalam transaksi politik

2.3.4. Karakteristik dan Faktor Berpengaruh Terhadap Biaya Transaksi

Perusahaan, birokrasi, organisasi, dll dianggap sebagai sebuah governance (tata kelola). Di dalamnya terjadi transaksi/interaksi antara individu/bagian. Transaksi dengan pihak luar (di luar governance) dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan eksternal yang tingkatannya lebih tinggi. Perubahan pada lingkungan kelembagaan eksternal berpengaruh transaksi yang terjadi antar individu/bagian dalam tata kelola. Transaksi dalam suatu governance juga dipengaruhi oleh sifat individu yang cenderung oportunis, self interest, greediness dll.

Contoh: Pemda merupakan sebuah governance. Transaksi yang terjadi dipengaruhi oleh kelembagaan internal dan lingkungan kelembagaan eksternal. Negara merupakan sebuah governance. Transaksi terjadi mengikuti kelembagaan internal tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan global. Semakin kompleks transaksi biayanya semakin mahal



Williamson, 1997

Gambar 1. Skema tingkatan Biaya Transaksi

Perusahaan, birokrasi, organisasi, dll dianggap sebagai sebuah governance (tata kelola). Di dalamnya terjadi transaksi/interaksi antara individu/bagian. Transaksi dengan pihak luar (di luar governance) dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan eksternal yang tingkatannya lebih tinggi. Perubahan pada lingkungan kelembagaan eksternal berpengaruh transaksi yang terjadi antar individu/bagian dalam tata kelola. Transaksi dalam suatu governance juga dipengaruhi oleh sifat individu yang cenderung oportunis, self interest, greeedi dll.

Contoh: Pemda merupakan sebuah governance. Transaksi yang terjadi dipengaruhi oleh kelembagaan internal dan lingkungan kelembagaan eksternal. Negara merupakan sebuah governance. Transaksi terjadi mengikuti kelembagaan internal tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan global. Semakin kompleks transaksi biayanya semakin mahal.

Karakteristik biaya transaksi. Merupakan karakteristik transaksi

Ketidakpastian dengan produksi, suka pada keadaan dan pertanian, perikanan. Transaksi pada masalah berbeda dengan **Spesifitas**, yang membatasi kegiatan yang terbatas.

Zhang (2000) mempengaruhi biaya

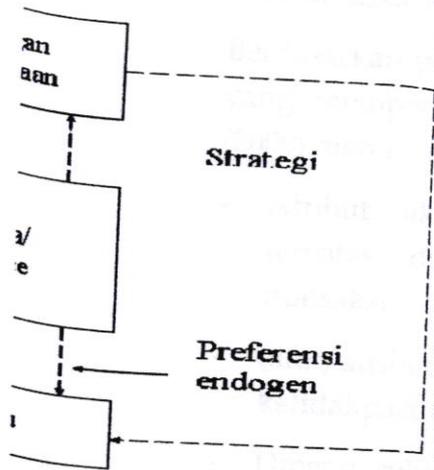
- **Karakteristik** (terkait dengan orang atas benda)
- **Identitas aktor** berkenaan dengan terbatas, yaitu menerima, kekurangan ket
- **Situasi teknis** bagaimana pertukaran tersebut ada intervensi pertukaran tersebut

Karakteristik transaksi mempengaruhi besaran biaya transaksi. Menurut Williamson (1996) ada tiga karakteristik transaksi yang penting, yaitu:

Ketidakpastian (uncertainty), terutama terkait dengan produksi, supply, demand, fluktuasi harga, iklim, kondisi lapangan, dan lain-lain. **Frekuensi**, tergantung pada keadaan dan kemampuan produksi. Produk pertanian, perikanan, sangat tergantung pada musim. Transaksi pada musim panen atau musim ikan melimpah berbeda dengan transaksi pada musim paceklik. **Spesifitas**, yang meliputi site specificity, physical asset specificity, human asset specificity. Asset yang spesifik membatasi kegiatan tertentu yang memiliki transaksi yang terbatas.

Zhang (2000) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi, sebagai berikut:

- **Karakteristik benda dan hak atas benda tersebut** (terkait dengan informasi mengenai benda dan status orang atas benda tersebut).
- **Identitas aktor yang terlibat dalam transaksi tersebut**, berkenaan dengan sifat manusia yang rasional terbatas, yaitu keterbatasan manusia mencari, menerima, menyimpan, mengolah informasi; kekurangan ketersediaan informasi.
- **Situasi teknis dan sosial** penataan pertukaran dan bagaimana pertukaran tersebut dikelola. Apakah pertukaran tersebut hanya karena kekuatan pasar atau ada intervensi kelembagaan yang turut menata pertukaran tersebut.

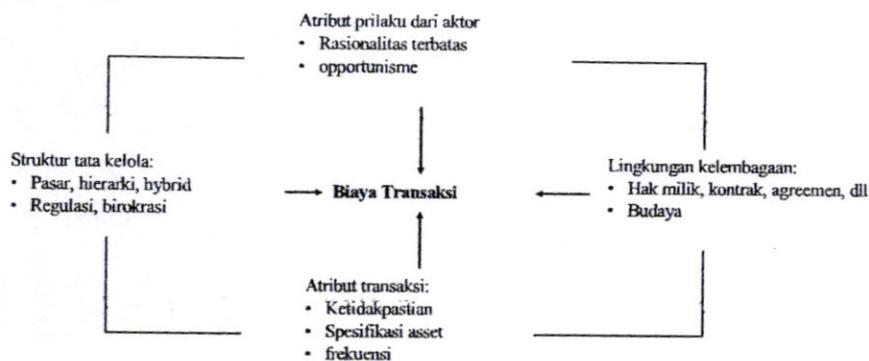


Biaya Transaksi organisasi, dll dianggap sebagai biaya transaksi (di luar governance) yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi dalam organisasi. Transaksi dalam organisasi dipengaruhi oleh sifat individu dan kelembagaan eksternal yang memengaruhi biaya transaksi. Semakin kompleks

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

Berdasarkan penjelasan tentang definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran biaya transaksi, Beckman (2000) memformulasi empat determinan biaya transaksi:

- Atribut aktor/pelaku yang melekat (rasionalitas terbatas dan oportunistik) menentukan besaran transaksi
- Sifat/atribut transaksi (spesifitas asset, ketidakpastian, frekuensi)
- Dipengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola (market, hierarki, hybrid, regulasi, dll)



Gambar 2. Faktor-faktor Berpengaruh terhadap Biaya Transaksi

PROF

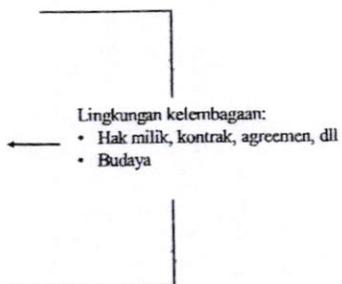
g definisi dan faktor-faktor biaya transaksi, Beckman terminan biaya transaksi:

ng melekat (rasionalitas e) menentukan besaran

(spesifitas asset,

erkaitan dengan struktur hybrid, regulasi, dll)

or



engaruh terhadap Biaya

BAB III

PROPERTY RIGHTS

BAB III

PROPERTY RIGHTS

3.1. Definisi Property Rights

Banyak yang mengartikan property sebagai benda (a thing). Namun penelusuran ilmiah oleh para ahli hukum, ekonomi, politik, dll, menunjukkan bahwa property merupakan hak atas sesuatu bukan sesuatu itu sendiri. Hak mengandung pengertian klaim atas sesuatu yang dapat ditegakan (enforceable) atau dihormati oleh pihak lain. Klaim atas sesuatu tanpa adanya perlindungan hukum atasnya atau tanpa bisa ditegakan tidak akan bermakna dan memberikan manfaat apa-apa. Oleh karena itu, unsur terpenting dari property adalah penegakan (enforcement).

Walaupun pengertian property sudah mengandung makna hak (rights) tapi banyak ditemukan adanya penggantian kata property dengan right sehingga muncul frase property rights (hak-hak kepemilikan). Ini merupakan penegasan atas kandungan makna hak yang ada dalam kata property. Dengan kata lain, property dapat diartikan sebagai kepemilikan atas sesuatu yang didalamnya terkandung makna hak untuk (paling tidak) mengambil manfaat dari sesuatu tersebut.

Karena property merupakan hak yang harus ditegakan/dihormati oleh pihak lain, maka property merupakan institusi/lembaga/aturan main, yang dalam

penegakannya memerlukan badan/lembaga yang berwenang menjamin tegaknya hak-hak tersebut. Ada juga yang beralasan mengapa property right perlu ditegakan karena property dianggap sebagai hak azasi manusia. Hak manusia untuk memiliki merupakan hak yang paling mendasar. Bila hak ini tidak ada, maka manusia kehilangan eksistensinya. Oleh karena itu, pihak berwenang (pemerintah, lembaga adat, atau lembaga yang mendapatkan mandat) harus berupaya agar property manusia atas sesuatu bisa tegak.

Property rights atau hak kepemilikan atas sesuatu mengandung pengertian hak untuk mengakses, memanfaatkan (utilize), mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak atas sesuatu tersebut pada pihak lain. Sesuatu yang dimaksud bisa berupa barang (fisik), jasa atau pengetahuan/informasi yang bersifat intangible. Pengertian property seperti ini sangat dekat dengan menguasai sesuatu secara eksklusif.

Bromley (1989) mendefinisikan propety right sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba/keuntungan secara aman (secure) karena orang lain respek terhadap aliran laba tersebut (terekait dengan transaksi).

Dari penjelasan di atas, property right merupakan klaim seseorang secara eksklusif atas sesuatu untuk memanfaatkan (utilize), mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak tersebut. Transfer bisa dalam bentuk menjual, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan dll. Property

sangat penting dalam kepastian penguasaan fa

Faktor-faktor pr utama untuk memperc proses produksi akan t perekonomian macet. atas lahan dan tenaga k telah mendapatkan p ekonomi dari masa ke r

2.3.2. Teori Property R

Furubotn dan kepemilikan dan bern kepemilikan individu c kepemilikan individu doktrin hak-hak alami klasik yang mengarah right/individualistis. S mendorong lahirnya property yang dianut : sosialis.

Furubotn dan kepemilikan dan bern kepemilikan individu c kepemilikan individu doktrin hak-hak alami klasik yang mengarah right/individualistis. S mendorong lahirnya property yang dianut : sosialis.

Caporapo dan Levine (1992) menjelaskan dua teori yang berbeda mengenai property rights. Menurutnya, aliran positivis menganggap hak-hak kepemilikan lahir melalui sistem politik. Sistem politik/kekuasaan mendesain hak kepemilikan dan menegakannya melalui pengadilan hukum. Kedua, aliran alamiah yang mengatakan bahwa hak kepemilikan melekat pada seseorang sejak lahir. Kelahiran individu disertai dengan kelahiran atas hak-haknya yang tidak bisa dipisahkan. Ditegakan atau tidak melalui prose pengadilan hukum, hak bawaan lahir sejatinya harus ada

Hak kepemilikan tidak merujuk pada hubungan antar manusia dengan sesuatu tapi hubungan antar manusia dengan manusia yang muncul dari keberadaan sesuatu dan penggunaannya. Kepemilikan atas sesuatu menjadi penting manakala sesuatu tersebut bersifat langka. Kepastian kepemilikan atas sesuatu yang langka sangat penting untuk dapat berlangsungnya proses transaksi. Semakin tinggi kepastian tersebut, biaya transaksinya semakin rendah. Dalam konteks property rights, biaya transaksi meliputi biaya transfer hak-hak kepemilikan dan perlindungan kepemilikan tersebut dari klaim pihak lain

Tietenberg (1992) mengidentifikasi karakteristik property right sebagai berikut:

1. Eksklusivitas: pemanfaatan, nilai manfaat dari sesuatu dan biaya penegakan, secara eksklusif jatuh ke tangan pemilik termasuk keuntungan yang diperoleh dari transfer hak kepemilikan tersebut

2. Transferability: dipindahkan dari secara suka rela m
3. Enforceability: h dihormati da perampasan/pem

Hanna (1995) r macam sebagaimana Pertama adalah priva oleh swasta dimana l dan lain-lain yang me tersebut sepenuhnya bisa bersifat perora adalah kepemilikan pemanfaatan, dan pe Negara pula yang barang/komoditas t adalah kepemilikan pemanfaatan, dan p dari sekelompok orar misalnya anggota k tertentu. Artinya, ha sejumlah orang yan Keempat adalah kepe hakekatnya, kepen kepemilikan karena mengklaim sebagai sumberdaya tersebut umumnya merupaka ada yang mengklaim

1992) menjelaskan dua teori property rights. Menurutnya, hak-hak kepemilikan lahir sistem politik/kekuasaan dan menegakannya melalui aliran alamiah yang kepemilikan melekat pada individu disertai dengan yang tidak bisa dipisahkan. proses pengadilan hukum, ada

merujuk pada hubungan atau tapi hubungan antar yang muncul dari keberadaan Kepemilikan atas sesuatu sesuatu tersebut bersifat atas sesuatu yang langka berlangsungnya proses kepastian tersebut, biaya Dalam konteks property biaya transfer hak-hak kepemilikan tersebut dari

identifikasi karakteristik

nilai manfaat dari sesuatu eksklusif jatuh ke tangan yang diperoleh dari tersebut

2. Transferability: seluruh hak kepemilikan dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik yang lain secara sukarela melalui jual beli, sewa, hibah dll
3. Enforceability: hak kepemilikan bisa ditegakkan, dihormati dan dijamin dari praktek perampasan/pembeslahan pihak lain.

Hanna (1995) membagi kepemilikan menjadi empat macam sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Pertama adalah private property, yaitu suatu kepemilikan oleh swasta dimana hak akses, pemanfaatan, pengelolaan dan lain-lain yang melekat dengan barang atau komoditas tersebut sepenuhnya menjadi hak swasta. Swasta disini bisa bersifat perorangan atau badan hukum. Kedua adalah kepemilikan oleh negara, dimana hak akses, pemanfaatan, dan pengelolaan dikendalikan oleh negara. Negara pula yang berhak mentransfer hak atas barang/komoditas tersebut kepada pihak lain. Ketiga adalah kepemilikan kolektif, dimana hak akses, pemanfaatan, dan pengelolaan menjadi milik bersama dari sekelompok orang yang sudah terdefinisi secara jelas, misalnya anggota kelompok, koperasi atau organisasi tertentu. Artinya, hak-hak tersebut hanya melekat pada sejumlah orang yang telah terdefiniskan secara jelas. Keempat adalah kepemilikan terbuka (open access). Pada hakekatnya, kepemilikan terbuka bukanlah hak kepemilikan karena tidak ada pihak yang dapat mengklaim sebagai pemilik dari komoditas atau sumberdaya tersebut. Lautan lepas atau hutan belantara umumnya merupakan kepemilikan terbuka karena tidak ada yang mengklaim sebagai pemiliknya.

Table 2. Tipe Kepemilikan beserta hak-haknya

Tipe	Pemilik	Pemilik/pemegang akses	
		Hak	Kewajiban
Kepemilikan private	Individu	Akses, pemanfaatan, kontrol	Mencegah pemanfaatan yang merugikan sosial
Kepemilikan Bersama	Kolektif	Akses, pemanfaatan, kontrol (pengecualian kepada non pemilik)	Merawat, mengatur tingkat pemanfaatan
Kepemilikan Negara	Negara/warga negara	Akses, pemanfaatan, kontrol (menentukan aturan)	Menjaga tujuan/manfaat sosial
Akses terbuka (tanpa kepemilikan)	Tidak ada	Pemanfaatan	Tidak ada

Juka Hanna (1995) menggunakan istilah tipe kepemilikan, Bromley (1991) menyebutnya rezim pengelolaan kepemilikan. Menurutnya, ada empat rezim kepemilikan, yaitu:

1. Rezime kepemilikan individu/pribadi (private property regime), yakni kepemilikan pribadi atas sesuatu dimana hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya.
2. Rezim kepemilikan bersama (common property regime), yakni kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut
3. Rezim kepemilikan oleh negara, hak kepemilikan dan aturan-aturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya

4. Rezim akses ter
mengatur menger

2.3.3 Sistem Ekonomi da

Sistem ekonomi kepemilikan, bahkan pembeda dari sistem model kepemilikan, siste tiga, yaitu kapitalis, sosia

Sistem ekonomi diserahkan kepada swa penyerahan kepemilikan mekanisme pasar ak ekonomi yang efisien. memiliki kepastian atas insentif untuk melaku pencapaian efisiensi pe kepemilikan atas aset ti informasi yang tidak me menumpuk pada seg memiliki insentif un sumberdaya langka y sehingga akan menyeb used.

Sistem sosialis, ha negara dimana negara seluruh sumberdaya ya bahwa dengan meny negara efisiensi distrib faktanya, efisiensi itu ekonomi dikendalikan

n beserta hak-haknya

Pemilik/pemegang akses	
Hak	Kewajiban
3, pemanfaatan, ol	Mencegah pemanfaatan yang merugikan sosial
3, pemanfaatan, ol (pengecualian la non pemilik)	Merawat, mengatur tingkat pemanfaatan
5, pemanfaatan, ol (menentukan n)	Menjaga tujuan/manfaat sosial
mfaatan	Tidak ada

4. Rezim akses terbuka, tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban

2.3.3 Sistem Ekonomi dan Property Rights

Sistem ekonomi tidak dapat lepas dari masalah kepemilikan, bahkan kepemilikan merupakan faktor pembeda dari sistem ekonomi dunia. Terkait dengan model kepemilikan, sistem ekonomi dunia dibagi menjadi tiga, yaitu kapitalis, sosialis dan campuran.

Sistem ekonomi kapitalis, seluruh kepemilikan diserahkan kepada swasta. Sistem ekonomi ini percaya, penyerahan kepemilikan kepada swasta yang diatur oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Hal ini karena setiap pemilik memiliki kepastian atas kepemilikannya sehingga menjadi insentif untuk melakukan aktivitas transaksi. Namun, pencapaian efisiensi pemerataan akan terhambat karena kepemilikan atas aset tidak merata, adanya eksternalitas, informasi yang tidak merata, dll sehingga aset hanya akan menumpuk pada segelintir orang. Setiap individu memiliki insentif untuk mengambil manfaat atas sumberdaya langka yang ada pada domain publik sehingga akan menyebabkan sumberdaya tersebut over used.

Sistem sosialis, hak kepemilikan diserahkan kepada negara dimana negara berhak memiliki dan mengelola seluruh sumberdaya yang ada. Penganut sistem ini yakin bahwa dengan menyerahkan hak kepemilikan pada negara efisiensi distribusi akan mudah dicapai. Namun faktanya, efisiensi itu sulit dicapai karena pertama: ekonomi dikendalikan oleh birokrat yang umumnya tidak

menggunakan istilah tipe 91) menyebutnya rezim menurutnya, ada empat rezim

individu/pribadi (private kepemilikan pribadi atas sesuatu tersebut melekat a aturan berkenaan dengan n sendiri dan hanya berlaku

sama (common property an oleh sekelompok orang jiban dan aturan ditetapkan i kelompok tersebut

egara, hak kepemilikan dan kan oleh negara, individu

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

reponsif terhadap kebutuhan masyarakat, kedua: penempatan kaum usahawan pada perusahaan publik kurang termotivasi (kurang insentif) untuk mencari keuntungan; ketiga: kontrol negara atas faktor produksi menyebabkan kekuasaan politik berada ditangan orang yang titunjuk negara; keempat: ketiadaan pasar menempatkan perencanaan ekonomi secara terpusat dimana supply, demand, preferensi konsumen ditentukan oleh negara.

Sistem ekonomi campuran, kepemilikan pribadi dijamin keberadaannya tapi negara juga berhak memiliki dan mengelola sumberdaya strategis yang menyangkut kepentingan umum, seperti sumberdaya air, lahan, laut, hutan dll. Sistem ini muncul karena baik kapitalis maupun sosialis memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sistem campuran ini dikenal dengan welfare economic system/social market economy dimana peran kelembagaan sangat dominan dalam mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam welfare state, hak kepemilikan diserahkan kepada swasta sepanjang hal tersebut memberikan insentif ekonomi bagi pelakunya dan tidak merugikan secara sosial, namun kepemilikan dapat pula diserahkan kepada negara manakala pasar tidak responsif atau mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Penyerahan kepemilikan pada swasta pada saat pasar tidak reponsif atas sumberdaya tersebut hanya akan menimbulkan kesejangan kesejahteraan. Disinilah peran negara diperlukan untuk mengintroduksi kelembagaan sebagai pengganti pasar yang mengalami kegagalan.

an masyarakat, kedua:
i pada perusahaan publik
insentif) untuk mencari
egara atas faktor produksi
tik berada ditangan orang
empat: ketiadaan pasar
ekonomi secara terpusat
rensi konsumen ditentukan

iran, kepemilikan pribadi
gara juga berhak memiliki
rategis yang menyangkut
umberdya air, lahan, laut,
ul karena baik kapitalis
elemahan dan kelebihan
iran ini dikenal dengan
l market economy dimana
gat dominan dalam
pada masyarakat. Dalam
diserahkan kepada swasta
kan insentif ekonomi bagi
an secara sosial, namun
erahkan kepada negara
onsif atau mengalami
tujuan-tujuan sosial.
swasta pada saat pasar
ya tersebut hanya akan
kesejahteraan. Disinilah
untuk mengintroduksi
pasar yang mengalami

BAB IV

EKSTERNALITAS, KEGAGALAN PASAR DAN PROPERTY RIGHTS

BAB IV

EKSTERNALITAS, KEGAGALAN PASAR DAN PROPERTY RIGHTS

4.1. Definisi Eksternalitas

Istilah eksternalitas dalam ilmu ekonomi telah lama dikenal. Kemunculannya tidak lepas dari nama besar ekonom Marshall, Pigou dan Meade. Istilah ini merujuk pada suatu pengertian bahwa kegiatan produksi suatu barang dapat menghasilkan manfaat atau biaya yang belum tercakup pada perhitungan proses produksi dari barang tersebut. Demikian juga, kegiatan konsumsi suatu barang oleh seseorang dapat meningkatkan nilai guna pada pemiliknya atau pada orang lain. Atau bisa juga menimbulkan dampak negatif pada orang lain yang berarti menurunkan daya guna orang yang bukan pemilik dari barang yang dikonsumsi tersebut. Adanya manfaat, biaya, penurunan atau peningkatan nilai guna yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang belum dikalkulasi disebut sebagai output eksternal. Dikatakan eksternal karena mekanisme pasar tidak/belum bisa memasukkan semua biaya atau manfaat tersebut, sebaliknya dianggap sebagai biaya atau manfaat sosial. Artinya, harga barang yang diproduksi atau yang

dikonsumsi belum mencerminkan nilai/harga sesungguhnya dari barang tersebut karena adanya dampak-dampak eksternal yang tidak/belum dapat dikalkulasi.

Pengertian lain eksternalitas diberikan oleh Baumol (1978). Menurutny, eksternalitas adalah efek yang timbul dari suatu kegiatan yang tidak dikompensasi ataupun diapresiasi. Sedangkan Kolm (1971) seperti dikutip oleh Simarmata (1994) mendefinisikan eksternalitas sebagai dampak dari keputusan seseorang pada orang lain tanpa melibatkan penerima dampak dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Dengan kata lain eksternalitas adalah dampak negatif atau positif yang tidak memiliki harga dimana baik penghasil maupun penerimanya tidak merasa memilikinya. Dengan demikian, eksternalitas baik positif maupun negatif tidak dapat diperjualbelikan karena tidak adanya harga dan property rights.

Meade (1973) mendefinisikan eksternalitas secara lebih luas dari definisi-definisi di atas. Ekonomi eksternal (diseconomy) adalah kegiatan yang menimbulkan manfaat atau kerugian secara nyata pada seseorang atau beberapa orang, dimana penerima dari manfaat atau kerugian tersebut tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang memungkinkan kegiatan tersebut dapat terjadi.

Fauzi (2004) mengartikan eksternalitas sebagai dampak kegiatan produksi atau konsumsi dari satu pihak mempengaruhi utilitas pihak lain secara tidak diinginkan. Dampak ini tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam. Musik yang terlalu keras, asap rokok

yang terhisap dari orang yang berbau sedap contoh-contoh dari efek kegiatan sehari-hari.

Dari sejumlah pakar ekonomi terdapat pengertian bahwa eksternalitas adalah kegiatan yang dirangsang oleh dampak tersebut namun tidak terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut. Contoh yang memperjelas fenomena ini adalah tukang kayu yang memanggil tukang lain selama memberikan jasa. tukang kayu juga menghasilkan suara dan alat-alat lainnya. tukang kayu membandingkan dengan suara bising rumah berlangsung. dengan tukang kayu rumahpun dapat ketidaknyamanan yang rumah berlangsung. tersebut merupakan konsekuensi dari jasa tukang kayu. Tidak dari tukang kayu tersebut. Walaupun pada hakikatnya tukang kayu menyukai suara bi

merminkan nilai/harga tersebut karena adanya yang tidak/belum dapat

litas diberikan oleh Baumol as adalah efek yang timbul ak dikompensasi ataupun (1971) seperti dikutip oleh ikan eksternalitas sebagai ang pada orang lain tanpa dalam proses pembuatan ta lain eksternalitas adalah ang tidak memiliki harga ipun penerimanya tidak emikian, eksternalitas baik k dapat diperjualbelikan property rights.

isikan eksternalitas secara di atas. Ekonomi eksternal an yang menimbulkan nyata pada seseorang atau erima dari manfaat atau ilibatkan dalam proses memungkinkan kegiatan

can eksternalitas sebagai i konsumsi dari satu pihak in secara tidak diinginkan. kait dengan pengelolaan ; terlalu keras, asap rokok

yang terhisap dari orang lain, parfum yang tercium baik yang berbau sedap ataupun sebaliknya merupakan contoh-contoh dari eksternalitas yang ditemukan pada kegiatan sehari-hari.

Dari sejumlah definisi yang disampaikan oleh para pakar ekonomi tersebut, kita bisa menarik sebuah pengertian bahwa eksternalitas merupakan dampak suatu kegiatan yang dirasakan baik oleh pihak penghasil dampak tersebut maupun pihak lain yang sama sekali tidak terlibat dalam proses kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut. Contoh berikut diharapkan dapat memperjelas fenomena eksternalitas. Seseorang memanggil tukang layu untuk memperbaiki rumahnya. Selama memberikan jasa perbaikan rumah, tukang kayu juga menghasilkan suara bising yang dihasilkan gergaji dan alat-alat lainnya. Dalam transaksi ini, pengguna jasa tukang kayu membayar jasa pelayanan sekaligus juga dengan suara bising yang dihasilkan selama perbaikan rumah berlangsung. Transaksi antara pemilik rumah dengan tukang kayu dilakukan secara suka rela. Pemilik rumahpun dapat menerima kebisingan dan ketidaknyamanan yang ia dapatkan selama perbaikan rumah berlangsung. Ia menganggap, ketidaknyamanan tersebut merupakan biaya yang harus dipikul sebagai konsekuensi dari jasa pelayanan yang diberikan oleh tukang kayu. Tidak mungkin ia akan mendapatkan jasa dari tukang kayu tanpa suara bising yang dihasilkannya. Walaupun pada hakekatnya, si pemilik rumah juga tidak suka dengan suara bising tersebut.

Jika pemilik rumah dapat menerima suara bising tersebut lain halnya dengan tetangga si pemilik rumah. Ia pasti merasa terganggu oleh suara bising tersebut dan dapat menyampaikan keberatannya. Jika keberatan tersebut tidak disampikan ia harus menanggung semacam biaya/kerugian dari kegiatan renovasi rumah yang ia tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan soal renovasi rumah tersebut. Bagi tetangga si pemilik rumah, hal ini merupakan eksternalitas. Eksternalitas ini bisa menjadi internal bila ada keikutsertaan dalam pengambilan keputusan.

4.2. Tipologi Eksternalitas

Sebagaimana telah disinggung di atas, eksternalitas dapat dihasilkan dari kegiatan produksi dan konsumsi. Artinya baik produsen maupun konsumen dapat merupakan penghasil eksternalitas, yaitu sesuatu yang tidak diapresiasi melalui mekanisme pasar. Fauzi (2004) menyebut eksternalitas semacam ini eksternalitas teknologi (*technological externality*). Selain eksternalitas teknologi, juga dikenal eksternalitas pecuniary (*pecuniary externality*). Eksternalitas ini terjadi karena adanya perubahan harga dari beberapa input maupun output produksi yang berdampak pada kegiatan ekonomi seseorang. Naiknya harga bahan bangunan menyebabkan orang tidak mampu membuat rumah dimana hal ini dapat menyebabkan tukang bangunan sulit mendapatkan pekerjaan.

Selain pembagian eksternalitas di atas, eksternalitas juga dapat dikelompokkan menjadi eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Dikatakan eksternalitas positif

jika penerima mengang bermanfaat, dan negatif rokok yang dihasilkan eksternalitas negatif, se pakai seseorang bisa mer orang lain.

4.3. Barang Publik (publi

Rasanya ada y eksternalitas tanpa meny publik adalah barang yar menimbulkan persaingan berkurang dengan adanya subtractable). Dengan ka menghalangi orang lain tersebut namun juga p tidak mengurangi p memanfaatkan juga. ramalan cuaca dan kema merupakan contoh publi 1998, Cornes and Sandler,

Menyimak penger kita dapat memasukan e publik. Suasana hijau, dihasilkan kebun teh m dihasilkan secara tidak se pohon teh yang tujuan ut untuk dijadikan bahan mi hijau ini dikatakan baru dapat menikmatinya t berkurang karena kegiatar

apat menerima suara bising
 etangga si pemilik rumah. Ia
 i suara bising tersebut dan
 eratannya. Jika keberatan
 harus menanggung semacam
 renovasi rumah yang ia
 pembuatan keputusan soal
 tetangga si pemilik rumah,
 itas. Eksternalitas ini bisa
 la keikutsertaan dalam

ggung di atas, eksternalitas
 a produksi dan konsumsi.
 apun konsumen dapat
 alitas, yaitu sesuatu yang
 nisme pasar. Fauzi (2004)
 macam ini eksternalitas
 ality). Selain eksternalitas
 litas pecuniary (pecuniary
 terjadi karena adanya
 a input maupun output
 pada kegiatan ekonomi
 i bangunan menyebabkan
 mah dimana hal ini dapat
 an sulit mendapatkan

alitas di atas, eksternalitas
 jadi eksternalitas positif
 akan eksternalitas positif

jika penerima menganggapnya sebagai sesuatu yang
 bermanfaat, dan negatif jika dianggap merugikan. Asap
 rokok yang dihasilkan oleh perokok bisa merupakan
 eksternalitas negatif, sedangkan harum parfum yang
 pakai seseorang bisa merupakan eksternalitas positif bagi
 orang lain.

4.3. Barang Publik (public goods) dan Eksternalitas

Rasanya ada yang kurang membicarakan
 eksternalitas tanpa menyinggung barang publik. Barang
 publik adalah barang yang dalam pemanfaatannya tidak
 menimbulkan persaingan (non-rivalry) dan juga tidak
 berkurang dengan adanya pemanfaatan tersebut (non-
 subtractable). Dengan kata lain, seseorang tidak dapat
 menghalangi orang lain untuk memanfaatkan barang
 tersebut namun juga pemanfaatannya oleh seseorang
 tidak mengurangi peluang orang lain untuk
 memanfaatkannya juga. Sinar matahari, informasi
 ramalan cuaca dan kemandirian yang diciptakan oleh negara
 merupakan contoh public goods paling populer (Buck,
 1998, Cornes and Sandler, 1986).

Menyimak pengertian barang publik seperti itu,
 kita dapat memasukan eksternalitas merupakan barang
 publik. Suasana hijau, asri, dan menyejukan yang
 dihasilkan kebun teh merupakan barang publik yang
 dihasilkan secara tidak sengaja dari kegiatan penanaman
 pohon teh yang tujuan utamanya menghasilkan daun teh
 untuk dijadikan bahan minuman. Mengapa pemandangan
 hijau ini dikatakan barang publik karena setiap orang
 dapat menikmatinya tanpa persaingan dan tidak
 berkurang karena kegiatan penikmatan oleh seseorang.

Jika semua orang berhenti menggunakan kendaraan bermotor dengan tujuan untuk menghemat BBM maka udara akan menjadi bersih dan pemanasan global yang mengancam kehidupan dunia dapat dikendalikan. Udara bersih dan berkurangnya pemanasan global merupakan eksternalitas positif dari kegiatan penghematan BBM. Ini merupakan barang publik yang dapat dinikmati oleh semua orang, baik mereka yang sebelumnya mempunyai kendaraan bermotor atau tidak, bahkan mereka yang sama sekali tidak terkait dengan kegiatan penghematan BBM dapat turut menikmatinya.

Sebaliknya, orang menggunakan kendaraan bermotor untuk mendapatkan kenyamanan dalam bepergian, ketepatan waktu, dan prestis. Namun selain mendapatkan tujuan-tujuan tersebut, menggunakan kendaraan bermotor juga dapat menambah polusi udara, meningkatkan kadar CO dan CO₂ di udara. Polusi udara, dan peningkatan kadar CO dan CO₂ dapat dirasakan oleh pemilik dan pengguna kendaraan dan juga oleh mereka yang tidak pernah menggunakan kendaraan bermotor sekalipun. Udara kotor ini merupakan barang publik berupa eksternalitas negatif dari kegiatan penggunaan kendaraan bermotor yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kenyamanan, ketepatan waktu dan prestis.

4.4. Eksternalitas dan Kegagalan Pasar

Untuk dapat memahami fenomena kegagalan pasar kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pasar. Pasar memiliki dua pengertian, pertama tempat dimana barang-barang yang diperjualbelikan berada dan di tempat itu pula terjadi pertemuan antara penjual dan

pembeli. Pasar dalam pengertian ini adalah pertemuan antara penjual yang disebut juga market maker dan pembeli yang disebut juga market taker. Kedua, pasar adalah suatu mekanisme dimana penjual dan pembeli mengadakan pertukaran barang, jasa, atau faktor produksi. Bisa berbentuk fisik, atau virtual seperti pasar internet (Samuelson dan Nordhaus, 2005). Untuk membedakannya dengan pasar tradisional, pasar sering digambarkan sebagai pertemuan antara penjual sehingga didapat frase market meeting.

Pasar memiliki fungsi untuk mengalokasikan barang-barang dan jasa. Komoditas pertanian dan perikanan adalah contoh oleh sebuah kekuatan. Industri perikanan dari Jakarta adalah komoditas dari satu terdistribusi ke berbagai barang-barang tersebut. Jumlah yang disediakan tidak cukup melainkan dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan yang terdistribusi.

Tidak hanya terjadi di pasar barang juga terjadi di pasar jasa. Contoh ikan tuna, kayu, rotan, dan sebagainya yang diproduksi di Indonesia dan dijual ke Eropa Barat, Jepang dan Amerika. Barang dari luar negeri seperti buah pir, anggur, sepatu, Babybenz, dan lain-lain

berhenti menggunakan
jualan nuntut menghemat
di bersih dan pemanasan
hidupan dunia dapat
berkurangnya pemanasan
as positif dari kegiatan
akan barang publik yang
orang, baik mereka yang
raan bermotor atau tidak,
kali tidak terkait dengan
at turut menikmatinya.

menggunakan kendaraan
an kenyamanan dalam
an prestis. Namun selain
tersebut, menggunakan
menambah polusi udara,
O₂ di udara. Polusi udara,
CO₂ dapat dirasakan oleh
ian dan juga oleh mereka
kan kendaraan bermotor
erupakan barang publik
ari kegiatan penggunaan
jualan utamanya adalah
patan waktu dan prestis.

1 Pasar

fenomena kegagalan pasar
a yang dimaksud dengan
ngertian, pertama tempat
erjualbelikan berada dan
muan antara penjual dan

pembeli. Pasar dalam pengertian ini berwujud secara fisik yang disebut juga market place dalam bahasa Inggris. Kedua, pasar adalah suatu mekanisme pada saat penjual dan pembeli mengadakan interaksi untuk melakukan pertukaran barang, menyepakati harga dan jumlahnya. Bisa berbentuk fisik, abstrak, atau hanya berupa dunia maya seperti apa yang terjadi dalam perdagangan lewat internet (Samuelson dan Nordhaus, 1995). Untuk membedakannya dengan pengertian yang pertama, kata pasar sering digandengkan dengan kata mekanisme sehingga didapat frase mekanisme pasar.

Pasar memiliki kekuatan medistribusikan dan mengalokasikan barang atau sumberdaya ekonomi. Aliran komoditas pertanian dari daerah menuju Jakarta didorong oleh sebuah kekuatan. Demikian juga aliran barang non pertanian dari Jakarta ke kota-kota lain, atau semua komoditas dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan barang-barang tersebut dari satu tempat ke tempat lain tidak ditentukan oleh pemerintah. Juga jumlah barang yang disediakan tidak dirancang oleh kekuatan tunggal melainkan dilakukan oleh jutaan individu, rumah tangga atau perusahaan yang tersebar di mana-mana.

Tidak hanya terjadi di dalam negeri, pergerakan barang juga terjadi dari satu negara ke negara lain. Udang, ikan tuna, kayu, rotan, sepatu, bahan tekstil dan lain-lain yang diproduksi di Indonesia tersebar ke berbagai negara Eropa Barat, Jepang dan Amerika. Sebaliknya, berbagai barang dari luar negeri seperti Apel merah, jeruk sankis, buah pir, anggur, sepatu adidas, mobil BMW, Audi, Babybenz, dan lain-lain bisa ditemukan dengan mudah di

berbagai kota di Indonesia. Barang-barang dari Indonesia terdistribusi ke luar negeri dan barang-barang dari luar negeri membanjiri Indonesia bukan dilakukan oleh kekuatan pemerintah.

Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan buku yang dikenal dengan nama *the wealth of nation*. Dalam buku tersebut Profesor Smith menuliskan: "Setiap orang berupaya untuk mendayagunakan modal yang dimilikinya untuk menghasilkan nilai paling tinggi. Dalam upaya mendayagunakan modalnya tersebut, orang tidak berniat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bahkan ia tidak tahu apakah ia sedang menuju ke arah itu. Namun, ketika ia mementingkan diri sendiri, mengejar kepuasan sendiri, ia akan diarahkan oleh tangan yang tidak nampak (*invisible hand*) yang bukan dari bagian yang diinginkannya menuju arah pencapaian kesejahteraan bersama. Dengan mengejar kepentingan diri sendiri sering kali pencapaian kepentingan umum jauh lebih efektif dibandingkan dengan mengusahakannya secara sengaja". Tangan tidak nampak itulah yang mendorong barang terdistribusi dari satu tempat ke tempat lain. Belakangan, para ekonom yakin, *invisible hand* yang dimaksud Adam Smith adalah kekuatan pasar. Mekanisme pasarlah yang menyebabkan barang mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Sebagaimana air mengalir dari satu tempat ke tempat lain karena adanya kekuatan hidrolik, gravitasi, dan angin yang tidak nampak.

Hal penting penyebab terjadinya aliran barang adalah adanya harga yang merupakan nilai barang dalam bentuk uang. Harga juga merupakan cerminan suatu

kondisi dimana seseorang tukar menukar dengan seseorang lain untuk menetapkan harga/nilai barang. Si A bersedia menjual barangnya dengan harga Rp 60 juta. Si B bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 50 juta. Si C bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 70 juta. Si D bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 80 juta. Si E bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 90 juta. Si F bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 100 juta. Si G bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 110 juta. Si H bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 120 juta. Si I bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 130 juta. Si J bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 140 juta. Si K bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 150 juta. Si L bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 160 juta. Si M bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 170 juta. Si N bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 180 juta. Si O bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 190 juta. Si P bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 200 juta. Si Q bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 210 juta. Si R bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 220 juta. Si S bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 230 juta. Si T bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 240 juta. Si U bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 250 juta. Si V bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 260 juta. Si W bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 270 juta. Si X bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 280 juta. Si Y bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp 290 juta. Si Z bersedia menjual barang tersebut dengan harga Rp 300 juta.

Jika harga mobil cenderung membeli mobil bekas. Harga mobil bekas cenderung menurun drastis. Stok mobil bekas cenderung berlebihan bagi pembeli, dealerpun mengalami kerugian. Pada tahun 1995 yang semula harga mobil bekas turun hanya Rp 50 juta. Harga mobil bekas kembali bergairah. Jual beli mobil bekas dengan harga yang lebih tinggi sempat tertahan di dealer. Harga mobil bekas Suplai dan demand cenderung seimbang yang lebih rendah. Dengan demikian nilai suatu barang transaksi antara penjual dan pembeli pertanda penting (sinyal) untuk menentukan berapa barang yang disediakan. Bila harga barang cenderung terjadi sehingga distribusi

rang-barang dari Indonesia
in barang-barang dari luar
a bukan dilakukan oleh

n Smith menerbitkan buku
e wealth of nation. Dalam
menuliskan: "Setiap orang
gunakan modal yang
ilkkan nilai paling tinggi.
n modalnya tersebut, orang
kan kesejahteraan bersama,
sedang menuju ke arah itu.
kan diri sendiri, mengejar
arahkan oleh tangan yang
l) yang bukan dari bagian
uju arah pencapaian
r mengejar kepentingan diri
r kepentingan umum jauh
dengan mengusahakannya
lak nampak itulah yang
usi dari satu tempat ke
a ekonom yakin, invisible
nith adalah kekuatan pasar.
nyebabkan barang mengalir
r. Sebagaimana air mengalir
in karena adanya kekuatan
ang tidak nampak.

r terjadinya aliran barang
upakan nilai barang dalam
erupakan cerminan suatu

kondisi dimana seseorang atau perusahaan mengadakan
tukar menukar dengan suka rela. Pasar mobil bekas telah
menetapkan harga/nilai Escudo bekas tahun 1995 Rp 60
juta. Si A bersedia membayar Rp 60 juta mobil tersebut
dan dealer tidak akan menjualnya jika penawaran dari si
A kurang dari Rp 60 juta. Melalui perdagangan atau
pertukaran dengan harga sebagai informasi atau media
terjadinya komunikasi antara penjual dan pembeli, maka
barang teralokasikan dari satu orang ke orang lain. Dalam
satu detik jutaan transaksi terjadi di dunia karena adanya
kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dan
barangpun mengalir tiada henti.

Jika harga mobil baru murah maka orang
cenderung membeli mobil baru dibandingkan dengan
membeli mobil bekas. Maka permintaan mobil bekas
menurun drastis. Stok melimpah. Di mana-mana dealer
mobil bekas kelebihan barang dagangan. Demi menarik
pembeli, dealerpun menurunkan harga. Escudo tahun
1995 yang semula narganya dipatok Rp 60 juta sekarang
turun hanya Rp 50 juta. Transaksi yang semula lesu kini
kembali bergairah. Jual beli mobil bekas kembali marak
dengan harga yang lebih murah. Mobil bekas yang
sempat tertahan di dealer-dealer kembali terdistribusi.
Suplai dan demand kembali seimbang pada titik harga
yang lebih rendah. Dengan demikian, harga merupakan
cerminan nilai suatu barang dan informasi penting agar
transaksi antara penjual dan pembeli dapat terjadi. Juga
pertanda penting (signal) bagi produsen untuk
menentukan berapa jumlah barang yang harus
disediakan. Bila harga tidak ada maka transaksi tidak
terjadi sehingga distribusi/alokasi barang menjadi

terhambat. Kondisi inilah yang disebut dengan kegagalan pasar (market failure).

Perman et al., (2003) mengidentifikasi 8 syarat terjadinya alokasi sumberdaya secara efisien melalui mekanisme pasar. Kedelapan syarat tersebut adalah: 1) keberadaan pasar untuk barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi; 2) semua pasar bersifat bersaing sempurna; 3) semua orang yang terlibat dalam transaksi memiliki informasi yang sempurna mengenai barang dan jasa yang ditransaksikan; 4) adanya kejelasan kepemilikan atas barang dan jasa (private property right terdefiniskan secara jelas); 5) tidak adanya eksternalitas; 6) tidak adanya barang publik; 7) all utility and production functions are well behaved dan 8) all agents are maximizers. Jika syarat ini tidak lengkap pasar tidak akan berjalan sempurna yang pada gilirannya akan mengalami kegagalan.

Dari kedelapan syarat tersebut yang relevan dengan topik eksternalitas adalah syarat nomor 4, 5 dan 6. Ini merupakan penegasan bahwa adanya eksternalitas, barang publik dan ketidakjelasan kepemilikan merupakan penyebab terjadinya alokasi barang secara tidak efisien. Mengapa hal ini terjadi? Karena eksternalitas dan barang publik tidak memiliki harga. Ketiadaan harga berarti kehilangan informasi penting yang harus direspon oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Tidak adanya respon dari pasar mengindikasikan pasar mengalami kegagalan.

4.5. Eksternalitas dan Pengelolaan Lingkungan

Eksternalitas merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan. Keberadaan lingkungan sering menimbulkan eksternalitas, terutama eksternalitas negatif (negative externality). Kegiatan produksi menghasilkan eksternalitas negatif seperti kegiatan produksi makanan yang menimbulkan limbah. Kami sajikan contoh.

Industri tekstil se output utamanya juga menimbulkan limbah. Limbah tersebut sering menimbulkan pencemaran lingkungan. Penjernihan sungai-sungai atau badan air tersebut dibuang menyalurkan limbah yang tinggal di sekitar lingkungan. Masyarakat dipaksa menggunakan badan air tersebut tanpa kompensasi atau ganti rugi lingkungan yang disediakan sebelumnya mereka menikmati lingkungan.

Produsen tekstil tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat yang menikmati lingkungan yang disediakan oleh badan air tersebut. Tidak ada harga dari lingkungan yang menimbulkan kehilangan jasa lingkungan. Produsen tidak memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang menikmati lingkungan yang sama. Mereka tidak harus diklaim dan mereka tidak harus melakukan klaim atau badan air tersebut ditransaksikan karena

ebut dengan kegagalan

identifikasi 8 syarat secara efisien melalui syarat tersebut adalah: 1) jasa yang diproduksi pasar bersifat bersaing terlibat dalam transaksi mengenai barang dan kejelasan kepemilikan property right terdefiniskan eksternalitas; 6) tidak adanya production functions are maximizers. Jika syarat tersebut berjalan sempurna akan terjadi kegagalan.

tersebut yang relevan syarat nomor 4, 5 dan 6. Jika tidak adanya eksternalitas, kepemilikan merupakan barang secara tidak efisien. Eksternalitas dan barang publik tidak ada harga berarti transaksi harus direspon oleh pasar. Tidak adanya kepemilikan pasar mengalami kegagalan.

1. Lingkungan

Salah satu aspek sumberdaya alam dan

lingkungan. Keberadaannya menyita perhatian karena lingkungan sering menjadi korban dari adanya eksternalitas, terutama eksternalitas negatif (negative externality). Kegiatan produksi maupun konsumsi pasti menghasilkan eksternalitas. Untuk memahami bagaimana kegiatan produksi menghasilkan eksternalitas, berikut kami sajikan contoh.

Industri tekstil selain menghasilkan tekstil sebagai output utamanya juga menghasilkan limbah limbah cair. Limbah tersebut sering dibuang tanpa melalui proses penjernihan sehingga dapat mencemari lingkungan. Sungai-sungai atau badan air lain tempat dimana limbah tersebut dibuang menjadi kotor dan bau sehingga orang yang tinggal di sekitar badan air tersebut tidak dapat lagi menggunakan badan air tersebut untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat dipaksa/terpaksa menerima keadaan ini tanpa kompensasi atas kehilangan sejumlah jasa lingkungan yang disediakan sungai atau badan air yang sebelumnya mereka nikmati.

Produsen tekstil merasa tidak perlu memberikan kompensasi kepada masyarakat karena jasa lingkungan yang disediakan oleh badan air merupakan barang publik, tidak ada harga dan pemiliknya. Masyarakat yang kehilangan jasa lingkungan juga tidak dapat meminta kompensasi kepada pihak industri tekstil dengan alasan yang sama. Mereka tidak tahu berapa kompensasi yang harus diklaim dan mereka juga tidak memiliki dasar untuk melakukan klaim karena bukan pemilik dari sungai atau badan air tersebut. Eksternalitas tidak bisa ditransaksikan karena tidak adanya harga dan kejelasan

property right. Karena itu, mekanisme pasar tidak dapat meresponnya. Dengan kata lain, eksternalitas berada di luar mekanisme pasar. Karena itu dikatakan eksternalitas, sesuatu yang ada di luar mekanisme pasar. Adanya eksternalitas dan ketidakberdayaan pasar menangainya merupakan sisi kelemahan dari sistem ekonomi pasar.

Industri tekstil tadi hanya merupakan contoh bagaimana kegiatan produksi menghasilkan eksternalitas yang merugikan lingkungan. Contoh lain dapat ditemukan dengan mudah di mana-mana dengan intensitas eksternalitas yang beragam. Degradasi sungai Citarum, di Jawa Barat, Sungai Siak dan Kampar di Riau, menurunnya kualitas air Danau Toba di Sumatera Utara, diakibatkan oleh eksternalitas yang dihasilkan oleh kegiatan produksi berbagai macam barang. Kegiatan pertambangan merupakan contoh lain yang sering ditemukan. Pertambangan emas, sebagai misal, selain menghasilkan emas juga menghasilkan limbah merkuri yang berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke sungai tentu saja akan merugikan pengusaha perikanan yang ada di hilirnya. Usaha pertambangan emas tidak memasukan kerugian yang diderita pengusaha perikanan sebagai biaya yang harus ia tanggung. Sebaliknya, hal tersebut dianggapnya sebagai biaya sosial.

Penggunaan air tanah oleh pihak industri di Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan contoh lain kasus eksternalitas. Kegiatan ini menghasilkan eksternalitas negatif berupa menurunnya permukaan air tanah, semakin dalamnya sumur-sumur penduduk dan mengeringnya sumur-sumur tersebut di musim kemarau.

Industri pengguna air tanah menimbulkan biaya pengambilan air tanah yang mahal dan kerugian masyarakat karena pencemaran tanah oleh industri tersebut.

Tidak hanya kegiatan industri yang juga menghasilkan eksternalitas. Kegiatan disinggung di atas, peternakan yang menghasilkan eskternalitas udara yang sangat merugikan kesehatan domestikpun merupakan konsumsi rumah tangga. Industri, bakar kayu, pupuk anorganik, oli, dan pestisida yang merugikan. Dan penerima eksternalitas menerima keadaan yang merugikan. Penghasil eksternalitas bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

4.6. Upaya Mengatasi Eksternalitas

Untuk menyelesaikan masalah eksternalitas, ekonom menwarakan tiga alternatif (Coase, 2004). Ketiga alternatif tersebut adalah 1) internalisasi, 2) pembatasan kepemilikan, dan 3) subsidi. Ketiga alternatif tersebut secara singkat pada bagian berikut.

Internalisasi merupakan upaya untuk mengatasi eksternalitas. Internalisasi merupakan upaya untuk mengalokasikan biaya yang diakibatkan oleh suatu kegiatan ke konsumen. Konsumsi menjadi sumber

anisme pasar tidak dapat
n, eksternalitas berada di
tu dikatakan eksternalitas,
ekanisme pasar. Adanya
yaan pasar menangainya
sistem ekonomi pasar.

nya merupakan contoh
menghasilkan eksternalitas
u. Contoh lain dapat
di mana-mana dengan
agam. Degradasi sungai
Siak dan Kampar di Riau,
Toba di Sumatera Utara,
s yang dihasilkan oleh
macam barang. Kegiatan
ntoh lain yang sering
as, sebagai misal, selain
hasilkan limbah merkuri
i dibuang ke sungai tentu
ha perikanan yang ada
n emas tidak memasukan
usaha perikanan sebagai
. Sebaliknya, hal tersebut
il.

oleh pihak industri di
at merupakan contoh lain
an ini menghasilkan
murunya permukaan air
ur-sumur penduduk dan
sebut di musim kemarau.

Industri pengguna air tanah hanya memperhitungkan biaya pengambilan air tanah sementara ia lepas terhadap kerugian masyarakat akibat dari kegiatan pengambilan air tanah oleh industri tersebut.

Tidak hanya kegiatan produksi, kegiatan konsumsi juga menghasilkan eksternalitas. Sebagaimana telah disinggung di atas, penggunaan BBM oleh kendaraan juga menghasilkan eksternalitas negatif berupa pencemaran udara yang sangat merugikan lingkungan. Limbah domestikpun merupakan eksternalitas dari kegiatan konsumsi rumah tangga. Penggunaan batu bara oleh industri, bakar kayu oleh rumah tangga, pestisida dan pupuk anorganik oleh petani menghasilkan eksternalitas yang merugikan. Dari berbagai kasus yang ditemukan, penerima eksternalitas hanya bisa pasrah tak berdaya menerima keadaan yang merugikan tersebut. Sebaliknya, penghasil eksternalitas juga merasa tidak harus bertanggungjawab atas apa yang dihasilkannya.

4.6. Upaya Mengatasi Eksternalitas

Untuk menyelesaikan kasus eksternalitas, para ekonom menwarakan tiga alternatif pendekatan (Fauzi, 2004). Ketiga alternatif tersebut adalah 1) melalui proses internalisasi, 2) pembebanan pajak, dan 3) pemberian hak kepemilikan. Ketiga alternatif tersebut akan dibahas secara singkat pada bagian akhir dari tulisan ini.

Internalisasi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi eksternalitas. Pada intinya, internalisasi merupakan upaya memasukan biaya eksternal yang diakibatkan oleh suatu kegiatan produksi maupun konsumsi menjadi sebuah keputusan yang utuh dan

menyatu dengan kegiatan produksi maupun konsumsi tersebut. Secara sederhana, hal ini bisa dipahami bahwa penghasil eksternalitas negatif memperhitungkan kerugian sosial akibat dari eksternalitas negatif sebagai bagian dari biaya produksi. Misalnya, industri mengolah air limbah atau mengurangi emisi udara melalui pemasangan instalasi pengolahan limbah atau melalui perbaikan teknologi bersih sehingga jumlah limbah yang dihasilkan menjadi berkurang. Kalau hal ini tidak dapat dilakukan, bisa juga dengan jalan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian harga/nilai barang yang dihasilkan menjadi lebih mahal. Sementara pada kegiatan konsumsi, internalisasi biaya sosial dapat mengurangi kenikmatan dari kegiatan mengkonsumsi sesuatu yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif tersebut.

Selain melalui proses internalisasi, eksternalitas juga dapat diatasi melalui pendekatan pajak/retribusi. Intinya, penghasil eksternalitas negatif yang merugikan pihak lain harus membayar pajak atau retribusi kepada pemerintah untuk setiap unit eksternalitas negatif yang dihasilkannya. Pemerintah menggunakan uang yang terkumpul dari pajak/retribusi tersebut untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu, proyek kali bersih, penghijauan kota, dan lain-lain.

Kedua pendekatan di atas didasarkan atas asumsi bahwa pasar tidak dapat berjalan. Eksternalitas berada di luar mekanisme pasar. Sedangkan pendekatan ketiga,

yaitu melalui pemberi dirugikan. Jika pihak katakanlah, hak untuk dimana hak tersebut ia dapat menjual hak eksternalitas negatif. temuan Ronald Coase dapat diselesaikan jika property right telah (1960).

Ketiga pendekatan pada satu persoalan, yaitu biaya eksternalitas negatif biaya eksternal yang penetapan besaran pajak memiliki dasar, berdasarkan dibebankan kepada Demikian juga dalam bersih kepada pihak diperlukan nilai/harga pentingnya valuasi lingkungan dapat memberikan nilai selama ini tidak mend

produksi maupun konsumsi ini bisa dipahami bahwa negatif memperhitungkan eksternalitas negatif sebagai misalnya, industri pengolahan emisi udara melalui limbah atau melalui hingga jumlah limbah yang 5. Kalau hal ini tidak dapat dengan jalan memberikan yang dirugikan. Dengan 3 yang dihasilkan menjadi pada kegiatan konsumsi, at mengurangi kenikmatan nsi sesuatu yang dapat gatif tersebut.

internalisasi, eksternalitas pendekatan pajak/retribusi. as negatif yang merugikan pajak atau retribusi kepada it eksternalitas negatif yang menggunakan uang yang etribusi tersebut untuk tif terhadap lingkungan. nan instalasi pengolahan air ek kali bersih, penghijauan

atas didasarkan atas asumsi alan. Eksternalitas berada di angkan pendekatan ketiga,

yaitu melalui pemberian property right kepada pihak yang dirugikan. Jika pihak yang dirugikan diberikan hak, katakanlah, hak untuk mendapatkan lingkungan bersih, dimana hak tersebut dapat diklaim atau ditegakan, maka ia dapat menjual hak tersebut kepada pihak penghasil eksternalitas negatif. Pendekatan ini sesuai dengan temuan Ronald Coase yang meyakini bahwa eksternalitas dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar asalkan property right telah didefinisikan secara tegas (Coase, 1960).

Ketiga pendekatan ini pada akhirnya bermuara pada satu persoalan, yaitu nilai eksternalitas. Internalisasi biaya eksternalitas membutuhkan pengetahuan berapa biaya eksternal yang harus diperhitungkan. Dalam penetapan besaran pajak/retribusi pun pemerintah harus memiliki dasar, berapa nilai yang pantas yang harus dibebankan kepada penghasil eksternalitas negatif. Demikian juga dalam penjualan hak atas lingkungan bersih kepada pihak penghasil eksternalitas negatif diperlukan nilai/harga klaim yang pantas. Disinilah letak pentingnya valuasi lingkungan sebagai alat (tool) untuk dapat memberikan nilai atas jasa-jasa lingkungan yang selama ini tidak mendapatkan penilaian yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baumol, W. J. 1978. *Economic Theory and Operation Analysis*. Prentice-Hall of India, New Delhi
- Bromley, D. W. (1989). *Economic Interests and Institutions. The Conceptual Foundations of Public Policy*. Basil Blackwell. New York.
- Buck, S. 1998. *The Global Commons. An Introduction*. Island Press, Washington, D.C
- Coase, R. 1960. The Problem of Social Cost. *Journal of Law and Economics* 3, No 1:1-44
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Teori dan Aplikasi*. Penerbit Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Furubotn, E. G and R. Richter. 2000. *Institution and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics*. Ann Arbor. The University of Michigan Press.
- Hamilton, W. H. 1932. Institution. In E. R. A. Seligman and A. Johnson. (Eds.). *Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol.8
- Hanna, S. and M. Munasinghe (1995). *An Introduction to Property Rights and the Environment*. In: S.

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

- Hanna and M. Munasinghe (eds.). Property Rights and the Environment: Social and Ecological Issues. The Beijer International Institute of Ecological Economics, World Bank.
- Hayek, F. A. 1968. Bemerkungen über die Entwicklung von System von Verhaltensregel. In F. A. Hayek. Friburger Studien. Tübingen.
- Kasper, W. and M. E. Streit. 1998. Institutional Economics, Social Order and Policy. Edward Elgar. Cheltenham, UK. and Northampton, MA. USA.
- Knight, J. 1992. Institution and Social Conflict. Cambridge University Press.
- Kolm, S. C. 1971. L'Etat et le System de Prix, Dunod, Paris
- Libecap, G. 1989. Distributional Issues in Contracting for Property Rights. Journal of Institutional and Theoretical Economics. Vol. 145.
- North, D. C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economics Performance. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1990). Governing of the common. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
- Perman, R., Y. Ma, J. McGilvray, and M. Common. 2003 Natural Resource and Environmental Economics. Third Edition. Pearson Adison Wesley.
- Posner, R. A. (1992). Property Rights and the Environment. Little, Brown, and Company.
- Ruddle, K. (1993). Institutional Change and Traditional Management Systems. Maritime Anthropology. 11: 1-15.
- Samuelson, P.A. dan W. Nordhaus. 1985. Ekologi dan Ekonomi. Edisi Kedua. Erlangga.
- Simarmata, DJ. A. 1994. Ekonomi tanpa Batas. Ekonometrika Universitas Indonesia.
- Schmid, A. 1972. The Role of Institutions. American Economic Review. 62: 1-10.
- Schotter, A. (1981). The Theory of Institutions. Cambridge University Press.
- Schlüter, A. and M. Wimmer. 1998. Institutional Change and Privatization Processes in the German Economy. Working Paper No. 1998/1. Humboldt University, Berlin, Germany.
- Uphoff, N. 2002. Building Institutions in Developing Countries. World Bank.

e (eds.). Property Rights
al and Ecological Issues.
Institute of Ecological

ber die Entwicklung von
gel. In F. A. Hayek.

Institutional Economics,
ard Elgar. Cheltenham,
USA.

cial Conflict. Cambridge

n de Prix, Dunod, Paris

ssues in Contracting for
of Institutional and
45.

stitutional Change and
Cambridge University

of the common. The
for Collective Action.

, and M. Common. 2003
vironmental Economics.
son Wesley.

Posner, R. A. (1992). *Economic Analysis of Law*, 4th ed.
Little, Brown, and Co, Boston.

Ruddle, K. (1993). External Forces and Change in
Traditional Community-Based Fisheries
Management System in the Asia-Pacific Region.
Maritime Anthropological Studies 6 (1-3): 1-37.

Samuelson, P.A. dan W. D. Nordhaus. 1995. *Mikro-
Ekonomi*. Edisis 14 (terjemahan). Penerbit
Airlangga.

Simarmata, DJ. A. 1994. *Ekonomi Publik dan Eksternal:
Ekonomi tanpa Pasar*. Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia

Schmid, A. 1972. The Economic Theory of Social
Institution. *American Journal of Agricultural
Economics*. 54:893-901

Schotter, A. (1981). *The Economic Theory of Social
Institutions*. Cambridge, Cambridge University
Press.

Schlüter, A. and M. Hanisch. 1999. *Theories of
Institutional Change and Their Applicability to the
Privatization Process in Agriculture in a Transition
Economy*. Working Paper. Department of Resource
Economics, Humboldt University of Berlin. Berlin,
Germany.

Uphoff, N. 2002. *Building Partnership with Rural
Institutions in Developing Local Capacity for*

Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si

Agricultural R & D. In Capacity Development for Participatory Research. International Potato Center. Los Banos, Philippines.

Williamson, O.E. 2000. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature. Vol. 38, pp. 595-613.

Williamson, O.E. 1996. The Mechanisms of Governance. Oxford University Press. Oxford.

TENT.



Ekonomi Manaj
Pekerjaan staf p
Fakultas Ekono
Program Pasca
tinggi lainnya
dalam melaku
penelitian dan
bidang ilmu so
pemakalah pa
maupun interna

Capacity Development for
International Potato Center.

Institutional Economics:
Journal of Economic
13.

Mechanisms of Governance.
Ford.

TENTANG PENGARANG



Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si., Lahir di Bantaeng, 15 Desember 1967. Pendidikan Sarjana S1 (1990) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi/Pendidikan Koperasi IKIP Ujung Pandang. Program Magister (1999) pada Program Studi Manajemen Agribisnis Unhas Makassar. Tahun 2005 menyelesaikan Program Doktor dalam Bidang

Ekonomi Manajemen di Universitas Padjajaran Bandung. Pekerjaan staf pengajar pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNM. Selain itu juga mengajar pada Program Pascasarjana UNM dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Makassar. Selain mengajar juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan ilmu ekonomi, juga penulis dan pemakalah pada jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.